

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2010-2016

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Iklal Hadi Anfana
Nomor Mahasiswa : 14313291
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2010-2016

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang stars 1

Program Studi Ilmu Ekonomi

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Iklal Hadi Anfana
Nomor Mahasiswa : 14313291
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UIL. Apabila di kemudia hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis



Iklal Hadi Anfana

PENGESAHAN

Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Provinsi

Nusa Tenggara Barat 2010-2016

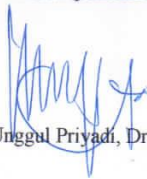
Nama : Iklal Hadi Anfana
Nomor Mahasiswa : 14313291
Program Studi : Ilmu Ekonomi



Yogyakarta, 21 Maret 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL
ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN

Disusun Oleh : **IKLAL HADI ANFANA**

Nomor Mahasiswa : **14313291**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 11 April 2018

Penguji/pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

Penguji : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta

Terimakasih atas segal cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, kepercayaan, dan doa tulus yang selalu dipanjatkan kepadaku.

Karya ini juga kupersembahkan kepada adikku tercinta Ina Rohayatul Anfana serta seluruh keluarga hajjah Fitriah terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, kepercayaan serta doa yang tulus selalu dipanjatkan kepadaku.

Karya ini kupersembahkan juga kepada kakak sepupuku kak Jeng, kak Ong, kak Yong, yang selalu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan karya ini dan kepada saudaraku Ali Anshori dan pacarnya mbak Anita yang selalu menemani main game untuk menghilangkan rasa stres dalam menulis karya ini dan kepada ponaan Yusfa Horizona yang selalu mendengarkan curhatanku dalam menulis karya ini. Terimakasih telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini kupersembahkan juga kepada teman-teman seperjuangan Aldi, Arin, Nina, Nurul, Dean, Andi, Rido, Herpan, terimakasih atas sumbangan saran dan pemikiran serta dukungan semangat dalam menyelesaikan karya ini. Mbak Danti yang selalu memberkan semangat dalam menyelesaikan karya ini. Teman-teman KKN K2.55.194.2017 Ifki, Ranti, Septiayu, Ulfah, Nuurfarida, Daru, Yusuf yang selalu memberikan semangat dan canda tawa dalam menyelesaikan karya ini. Saudara-saudara IE 2014 IE SATU, IE KELUAGA, IE SATU KELUARGA.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan karena syafatnya kita dapat hijrah dari zaman kegelapn menuju zaman yang diridhoi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sajana Stara S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitan ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahn dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak erkait lainnya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak lupa mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan karena syafatnya kita dapat hijrah dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Orangtua tercinta, Ayahanda Mawardi dan Ibunda Rohyani tercinta yang tiada pernah hentinya mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya serta doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis.
 4. Adiku tersayang Ina Rohayatul Anfana, atas semangat, keyakinan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
 5. Unggul Priyadi, Dr.,M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini terima kasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ilmu-ilmu yang bapak berikan kepada penulis selama menempuh jenjang S1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya.
 6. Seluruh Dosen dan Staf karyawan UII yang telah mewariskan ilmunya kepada penulis dengan tulus.
 7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi FE UII terima kasih atas sumbangan saran, pemikiran-pemikiran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih.
- Semoga segala bentuk, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah S.W.T.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2018
Penulis

Iklal Hadi Anfana
14313291

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi.....	ix
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Daftar Gambar	xiii
Halaman Lampiran	xiv
Halaman Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.1.1 penelitian Terdahulu	14

2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Struktur Ekonomi	16
2.2.2 Indikator Pembanguna	18
2.2.3 PDRB Perkapita.....	20
2.2.4 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2.5 Teori Pertumbuhan Solow	23
2.2.6 Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	25
2.2.8 Krangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis dan Sumber Data	31
3.2 Definisi Oprasional Variabel	31
3.3 Metode Analisis	32
3.3.1 Analisis Struktur Ekonomi.....	32
3.3.1.1 Analisis Shift-Share.....	32
3.3.1.2 Analisis Tipologi Klassen.....	33
3.3.2 Analisis Ketimpangan Pembangunan	35
3.3.2.1 Indeks Williamson	35
3.3.2.2 Indeks Gini.....	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Analisis	37
4.1.1 Struktur Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	37
4.1.1.1 Analisis Shift-Share.....	40
4.1.1.2 Analisis Tipologi Klassen.....	48

4.1.2 Kondisi Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	54
4.1.2.1 Anaisis Indeks Williamson	55
4.1.2.2 Analisis Indeks Gini	57
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Struktur Ekonomi	60
4.2.2 Tipologi Klassen.....	61
4.2.3 Tingkat Kesenjangan antara Kabupaten/Kota.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Implikasi	65
Daftar Pustaka	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Perbandingan Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Tahun 2010-2016.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.2 Matriks Tipologi Klassen	18
Tabel 2.3 Indikator Pembangunan.....	19
Tabel 3.1 Oprasional Variabel.....	31
Tabel 3.2 Tipologi Daerah	34
Tabel 4.1 Nilai Analisis Shift Share di Provinsi NTB	41
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB.....	49
Tabel 4.3 PDRB Per Kapita di Provinsi NTB	49
Tabel 4.4 Matriks Tipologi Klassen Provinsi NTB	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Distribusi PDRB Per Pulau Terhadap Pembentukan PDB	
Naional.....	2
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTB, Provinsi Bali,	
dan Provinsi NTT	3
Gambar 2.1 Kurva Hipotesis Neo-Klasik	26
Gambar 2.2 Kurva Hipotesis Kuznet	28
Gambar 2.3 Krangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 PDRB Sektoral dan Laju Pertumbuhan	38
Gambar 4.2 Regional Share.....	42
Gambar 4.3 Proporsional Shift	44
Gambar 4.4 Matriks Tipologi Klassen Provinsi NTB	52
Gambar 4.5 Indeks Williamson.....	56
Gambar 4.6 Indeks Gini	57
Gambar 4.7 Indeks Williamson, Indeks Gini, Kemiskinan dan Pengangguran .	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Riil Provinsi NTB tahun 2010-2016	69
Lampiran 2. Hasil Analisis Shift Share Provinsi NTB tahun 2010-2016	72
Lampiran 3. Hasil Analisis Shift Share Kabupaten/Kota di Provinsi NTB	76
Lampiran 3. Jumlah Penduduk Provinsi NTB.....	79
Lampiran 4. PDRB Per KapitaProvinsi NTB.....	80
Lampiran 5. Laju pertumbuhan ekonomia di Provinsi Nusa Tenggara Barat (persen)	80
Lampiran 6. Matriks Tipologi Daerah	81
Lampiran 7. Indeks Williamson Provinsi NTB	81

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis shift share dan analisis tipologi klasen untuk melihat perubahan struktur ekonomi di provinsi nusa tengara barat. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode shift share dan tipologi klasen, diperoleh hasil bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki dekomposisi pertumbuhan yang lebih besar dari sektor primer karena memiliki koefisien yang lebih besar, untuk metode tipologi klasen diperoleh tiga daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram), satu daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Dompu), satu daerah cepat berkembang (Kabupaten Lombok Tengah), dan lima daerah relatif tertinggal (Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kota Mataram).

Analisis ketimpangan pembangunan menggunakan analisis indeks williamson dan indeks gini. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perhitungan rumus matematika indeks williamson dan indeks gini diperoleh hasil bahwa selama periode penelitian ketimpangan pembangunan di provinsi nusa tenggara barat cenderung menurun, hal ini ditunjukkan oleh nilai indeks williamson dan indeks gini yang semakin mendekati nol.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan, Struktur Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Williamson

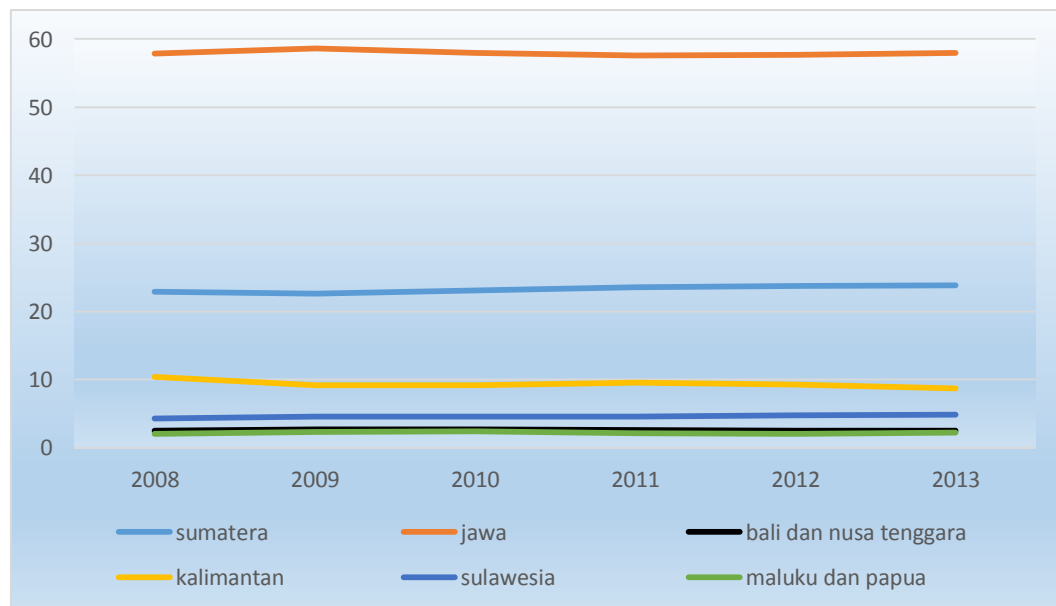
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan, Todaro, (2007). Maka sejatinya tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, berkelanjutan dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan Wilayah. Ketimpangan Wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya Wilayah yang maju dengan Wilayah yang terbelakang atau kurang maju.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang umum dan *familiar* bagi masyarakat karena dengan mudah diukur secara kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya kenaikan pendapatan total maupun individu sebagai akibat meningkatnya produk domestik bruto atau produk nasional bruto, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berubah atau tidak. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan berencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan kerja dan pembagian hasil-hasil pembangunana yang lebih merata. Jika hal ini

berlangsung secara berkelanjutan maka Daerah-Daerah akan terpacu untuk terus tumbuh dan berkembang. Daerah yang semula tidak produktif dan tertinggal akan memiliki peluang untuk maju dan memiliki produktivitas yang sama atau bahkan lebih baik dari Daerah lainnya.

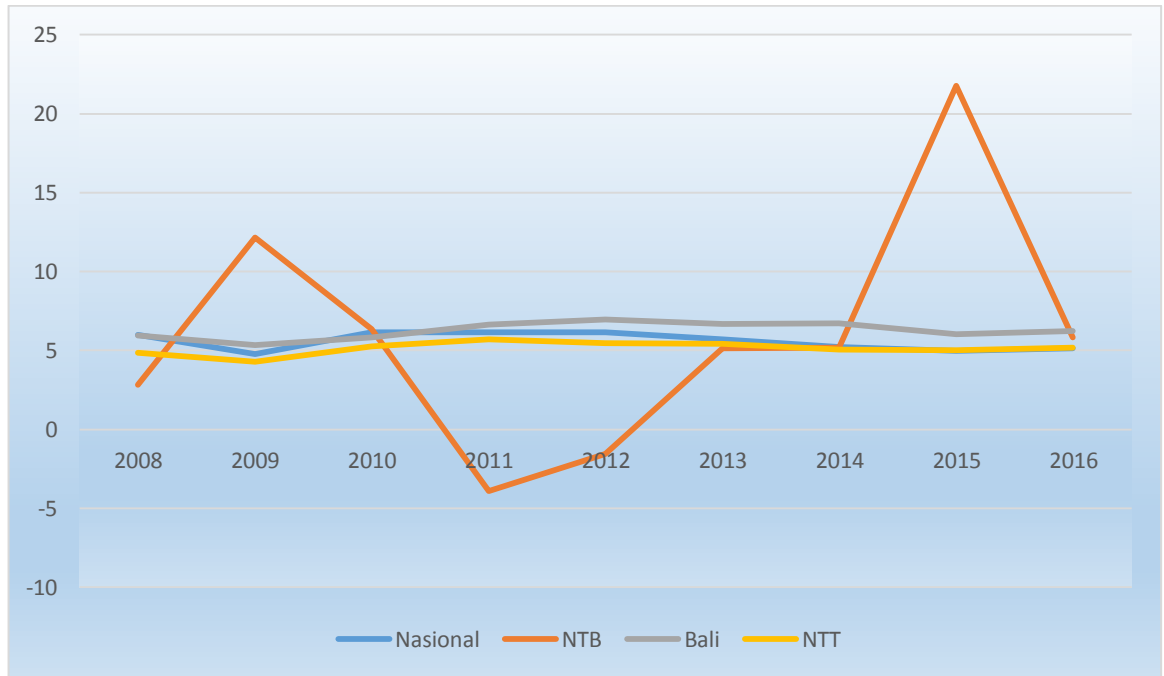


Sumber : BPS Pusat, 2015.

Gambar 1.1
Distribusi PDRB per Pulau Terhadap Pembentukan PDB Nasional

Peranan dan pembentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pulau masih didominasi oleh pulau Jawa dan diikuti oleh pulau Sumatera dan pulau lainnya rata-rata menyumbang pertumbuhan dibawah 10 persen. Adanya konsentrasi pembangunan yang dilakukan di pulau Jawa dibandingkan dengan pulau diluar Jawa menjadikan pulau Jawa sebagai sumber terbesar pembentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari data di atas kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi hampir 60 persen oleh pulau Jawa, dari data ini menggambarkan bahwa sampai saat ini masih terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara pulau Jawa dengan luar Jawa. Bahkan ketimpangan tidak hanya

terjadi antara pulau Jawa dengan luar Jawa ketimpangan terjadi juga di antara Wilayah atau regional.



Sumber : BPS NTB, 2016

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTB, Provinsi Bali, dan Provinsi NTT

PDRB atas harga konstan Provinsi NTB, selama tahun 2008-2016 tumbuh dengan rata-rata 5,97 persen pertahun, jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan Provinsi Bali dan Provinsi NTT, tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi NTB berada di antara kedua Provinsi tersebut, Provinsi Bali memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi yaitu 6,27 persen, pertumbuhan rata-rata Provinsi NTT menjadi yang terendah yaitu 5,13 persen.

Selama periode tahun 2008-2016 Provinsi NTB terus mengalami perkembangan yang positif, hal ini digambarkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dua tahun terakhir mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2015 Provinsi NTB menjadi Provinsi dengan

tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan 21,77 persen, pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi Nasional 4,99 persen. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan 5,82 persen, berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh 5,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi suatu Daerah dapat diketahui dari peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi akan berdampak terhadap ketimpangan pembangunan, Daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, akan cenderung menjadi Daerah dengan pertumbuhan yang cepat akan tetapi Daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Menurut Kuncoro (2004), pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa Daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa Daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-Daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki dan adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih Daerah perKotaan atau Daerah yang memiliki fasilitas, seperti prasaranan perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja terampil. Sementara itu perbedaan potensi dan fasilitas serta kemudahan pada setiap Daerah akan membuat industri ataupun aktivitas ekonomi menjadi mengelompok dan membentuk suatu aglomerasi.

Menurut Lincolin Arsyad (2004), Pembangunan ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam Wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi Daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kehasan Daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik lokal (Daerah).

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Daerah, melalui pembangunan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan Daerah yang efisien dan efektif menuju kemandirian Daerah dan kemajuan yang merata, Tambunan (2003). Kenyataannya selama ini pembangunan hanya ditunjukan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup masyarakat, artinya tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila suatu Daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, angka kemiskinan rendah, angka pengangguran rendah.

Provinsi NTB memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota yang masing-masing Kabupaten/Kota memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, perbedaan pertumbuhan ekonomi antar Wilayah akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara Daerah yang satu dengan Daerah yang lainnya, perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar Wilayah yang terjadi di Provinsi NTB disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing Wilayah. Akibat dari perbedaan ini akan menyebabkan kemampuan suatu Daerah untuk mendorong pembangunana menjadi berbeda. Hal ini tidaklah mengherankan bilamana pada suatu Daerah terdapat Daerah maju dan Daerah terbelakang. Ketimpangana pembangunan dapat diketahui secara vertikal yaitu perbedaan pada distribusi pendapatan dan secara horizontal yakni perbedaan antara Daerah maju dan terbelakang, Sjafrizal(2008).

Berdasarkan sisi produksi atau supply side, kontribusi pembentuk pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB porsi terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian dengan kontribusi rata-rata pertahun selama 2011-2016 sebesar 23,05 persen. Meskipun meiliki peranan terbesar, sektor pertanian rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 4,37 persen, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan pertambangan dan penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 10,48 persen, diikuti oleh laju pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 11,01 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah sektor listrik dan gas dengan porsi hanya 0,05 persen terhadap PDRB dan laju pertumbuhan sebesar 14,14 persen.

Berdasarkan sisi pengeluaran demand side, selama tahun 2011-2016 kontribusi sektor pengeluaran rumah tangga rata-rata sebesar 70.56 persen pertahun, terbesar dari semua sektor, dengan rata-rata laju pertumbuhan 8.93 persen pertahun. Sektor pengeluaran konsumsi pemerintah menempati urutan ketiga sebesar 16,35 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 12, 46 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah sektor pembentukan modal total bruto dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 14,12 persen dengan kontribusi terhadap total pembentukan PDRB sebesar 36,56 persen.

Pada kenyataannya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus menerus meningkat tidak secara otomatis akan menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan pembangunan yang paling jelas dan umum kita lihat adalah ketimpangan pada tingkat pendapatan yang pada akhirnya akan mengakibatkan adanya golongan kaya dan miskin, aspek spasial yang menyebabkan adanya Daerah maju dan Daerah terbelakang serta aspek spasial yang menyebabkan adanya sektor unggulan dan non unggulan. Ketimpangan pembangunan menjadi persoalan yang kompleks sehingga sulit untuk di atasi.

Provinsi NTB terjadi perbedaan pembangunan pada setiap Kabupaten dan Kota. Kota Mataram selaku ibu Kota Provinsi dan menjadi jantung penggerak kegiatan perekonomian. Dinamika perekonomiannya sangat terasa dibidang jasa, perdagangan dan pendidikan. Hal ini tidaklah mengherankan jika masyarakat memiliki pendapatan prkapita yang lebih tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah, kualitas SDM yang baik menyebabkan Indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi serta akses terhadap infrastruktur yang

lebih mudah dijangkau. Berbeda dengan yang dirasakan oleh Wilayah-Wilayah Kabupaten lainnya. Kabupaten Sumbawa misalnya sebagai Kabupaten terluas dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan fisik Wilayah yang lebih luas, penduduk dan ketersediaan infrastruktur lebih menyebar dan tidak merata. Hal ini menggambarkan bahwa masih tingginya tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi NTB.

Ketimpangan jumlah penduduk, besarnya PDRB dan PDRB per kapita juga menjadi gambaran ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi NTB. Kesenjangan ekonomi antar Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi, digambarkan dari besarnya gap antara Kabupaten atau Kota dengan melihat PDRB per kapita tertinggi dan terendah dalam kurun waktu 2008-2013. Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten dengan PDRB per kapita terendah dengan rata-rata 11,36 juta rupiah pertahun. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di Kabupaten Lombok Timur yang sebagian besar adalah masyarakat miskin. Jumlah penduduk miskin kedua terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 19,00 persen pada tahun 2014, lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi dan nasional. Kabupaten Lombok Utara sebagai Kabupaten termuda yang mekar pada tahun 2008 dari Wilayah induknya Kabupaten Lombok Barat, memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi 35,52 persen pada tahun 2014, dengan rata-rata pendapatan perkapita 13,94 juta pertahun berada di atas Kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Kabupaten dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi dengan rata-rata 118,31 juta pertahun,

dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, besarnya pendapatan prkapita Kabupaten Sumbawa Barat disumbangkan oleh sektor pertambangan dari konsentrat tembaga. Kontribusi sektor pertambangan komposisinya mencapai lebih dari 80 persen terhadap total PDRB Sumbawa Barat. Kontribusi ini sebagian dinikmati perekonomian Sumbawa Barat secara langsung tapi sebagian besar berupa royalti yang tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. PDRB Kabupaten Sumbawa Barat tinggi karena didukung oleh ekspor tembaga, dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar sehingga nilai pendapatan prkapita menjadi tinggi. Jika penggalan dan pertambangan berhenti beroperasi maka PDRB Kabupaten Sumbawa Barat akan mengalami penurunan.

Tabel 1. 3
Perbandingan Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun
2010-2016

Uraian	Kondisi Awal Provinsi (2010)	Kondisi Trakhir (2016)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,11	5,82
Penduduk (juta jiwa)	4.500	4.896
Pengangguran (%)	5,29	3,94
Kemiskinan (%)	21,55	16,02
Inflasi (% pertahun)	9,06	3,02
PDRB Riil (milyar rupiah)	70 122.72	116 246.73
PDRB prkapita Riil (juta rupiah)	15.53	23.74
Pengeluaran prkapita Riil (rupiah)*	6.335	9.575
Nilai Ekspor (US\$)	137.020,4	150.366,8
Angka Harapan Hidup (tahun)	61,50	65,48
Angka Melek Hurup (%)	80,13	87,06
Rata-rata Lama Sekolah	6,70	6,79
IPM dan rangking nasional	64,1 (32)	65,81 (32)

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2016.

Secara umum indikator perekonomian Nusa Tenggara Barat kurun waktu tahun 2010-2016 positif dan terus tumbuh, laju pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh di atas rata-rata Nasional, angka pengangguran mengalami penurunan yang signifikan bahkan setengah dari persentase pada tahun 2010 diikuti dengan angka kemiskinan yang menurun signifikan sampai menyentuh angka 16,02 persen. Pendapatan masyarakat secara total maupun per kapita juga meningkat. Ditungjang dengan laju inflasi yang menurun menyebabkan daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Komponen pembentuk Indeks pembangunan manusia juga meningkat walaupun IMP Nusa Tenggara Barat secara nasional tetap berada diperingkat 32.

Berdasarkan latar belakang di atas ini maka diperlukan peneleitian yang bertema “Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat?.
2. Bagaimana kondisi ketimpangan pembangunan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Bara?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara deskriptif perubahan struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Menganalisis secara deskriptif kondisi ketimpangan pembangunan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Menjadi masukan dan bahan perbandingan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masing-masing Kabupaten/Kota dalam penentuan kebijakan perbaikan struktur ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pembangunan.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi tinggi disertai pengurangan ketimpangan pembangunan.

3. Menjadi informasi bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan struktur dan pertumbuhan serta ketimpangan pembangunan baik skala nasional maupun lokal.

1.5. Ruang lingkup penelitian

1. Penelitian di lakukan terhadap 2 Kota dan 8 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu unit analisis sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Wilayah referensi.
2. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Landasan teori membahas teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data penelitian, serta menguraikan tentang deskripsi data dan hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan implikasi, serta saran yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel serta analisis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik ditingkat nasional, Provinsi maupun ditingkat Daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul, Penulis & tahun	Hasil
Anaalisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010, (Anton Tri Wijayanto, 2016)	Metode analisis: Indeks Gini Indeks Pro-Poor Growth Hasil penelitian: Pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara juga meningkatkan ketimpangan pendapatan.
Analisis kesenjangan pembangunan ekonomi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah di era otonomi Daerah tahun 2002-2011, (Panji Irawan Yogyadipratama ¹ , P.eko Prasetyo ² , Fafurida ³ , 2016)	Metode analisis: Indeks Williamson Hasil penelitian: Ketimpangan pembangunan ekonomi antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson selama periode 2008-2011 menunjukkan ketimpangan semakin melebar.
Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antara Kabupaten di Kalimantan Timur, (Tutik Yuliani, 2015)	Metode analisis: Indeks Williamson Indeks Entropy Theil Hipotesis Kuznets Hasil penelitian: Peningkatan ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di sebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Indeks Entropi Theil semakin kecil dengan kata lain distribusi pendapatan semakin merata dari tahun ketahun. dari hasil analisis Hipotesis Kuznets antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks

	Williamson berhubungan negatif, hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan pembangunan semakin tinggi.
Analisis ketimpangan dan pembanguana ekonomi Provinsi Gorontalo, tahun 2001-2008, (Herwin Mopangga, 2011)	Metode analisis: Shift share Matrik tipologi klassen Indeks Williamson Indeks Gini ratio Hasil penelitian: Berdasarkan Indeks Williamson kondisi ketimpangan di Provinsi Gorontalo di awal pembangunan cenderung meningkat dan berangsur menurun. Secara simultan perbedaan pada PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Belanja Infrastruktur (RBI) sangat signifikan sebagai sumber utama ketimpangan di Provinsi Gorontalo.

Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan ketimpangan pembangunana, artinya jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka ketimpngan pembangunan akan meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneltian ini tidak hanya meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembagunan, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah terjadi perubahan struktur ekonomi di Daerah yang diteliti atau tidak, Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis *Shift share*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Struktur ekonomi

Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Todaro(2000).

Menurut Djodjohadikusumo (1994), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur perekonomian, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian antara perubahan struktur dan pertumbuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Menurut Tarigan (2007), untuk melihat struktur ekonomi secara lebih tajam digunakan analisis Shift-share. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu Daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor disuatu Daerah dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Menurut Sjafrizal (2008), dengan menggunakan analisis *Shift-Share* maka akan dapat diketahui komponen atau unsur pertumbuhan mana yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Menggunakan data tahun 2000-2005, Sjafrizal melakukan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera Barat. Salah satu yang jadi bagian bahasannya adalah perekonomian nasional, struktur dan kekhususan ekonomi Daerah. Untuk melihat ketiga variabel ini, Sjafrizal menggunakan analisis *Shift-Share*. Hasilnya, kontribusi regional share terhadap perekonomian Daerah Sumatera Barat sebesar 10,8%. Fakta ini cukup menarik karena dugaan banyak kalangan adalah bahwa kontribusi perekonomian nasional tersebut akan jauh lebih besar dari itu. Alasannya adalah karena sumber daya yang terdapat pada Daerah Sumatera Barat sebenarnya tidaklah terlalu banyak bila dibandingkan dengan Daerah lainnya.

Struktur ekonomi suatu Wilayah juga dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis tipologi Daerah. Menurut Hill dalam Mudrajad Kuncoro (2004), analisis tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing Daerah. Tipologi Daerah pada dasarnya membagi Daerah menjadi 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi Daerah dan pendapatan prkapita (PDRB per kapita). Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan prkapita (PDRB per kapita) sebagai sumbu horizontal, Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:

1. High growth and high income (Daerah cepat maju dan cepat tumbuh)
2. High growth but low income (Daerah berkembang cepat)

3. Low growth and low income (Daerah relatif tertinggal)
4. High income but low growth (Daerah maju tapi tertekan)

Tabel 2. 2

Klasifikasi ini disederhanakan dalam matriks berikut:

PDRB prkapita (y) Laju pertumbuhan (r)	($y_i < y$)	($y_i > y$)
($r_i > r$)	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi
($r_i < r$)	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah

Keterangan : r : rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi.

y : rata-rata PDRB prkapita Provinsi

ri : pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang diamati.

yi ; PDRB prkapita Kabupaten/Kota yang diamati.

Penggunaan Tipologi Klassen ini seperti yang dilakukan oleh Hairul Aswandi dan Mudrajad Kuncoro (2002). Mereka memfokuskan pada penetapan kawasan andalan dengan studi empiris di Kalimantan Selatan tahun 1993-1999. Hasil analisis pengklasifikasian Daerah menunjukkan bahwa pengklasifikasian Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik dengan menggunakan empat klasifikasi menurut Tipologi Klassen dari pada hanya berdasarkan klasifikasi kawasan andalan dan kawasan bukan andalan. Empat klasifikasi Daerah tersebut yaitu Daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, Daerah maju tapi tertekan, Daerah berkembang cepat dan Daerah relatif tertinggal.

2.2.2. Indikator Pembangunan

Menurut Rustiadi (2009), persoalan pembangunan di negara sedang berkembang tidak hanya menyangkut perlunya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan aspek distribusi dan pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian hasil pembangunan dapat

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional. Para pakar pembangunan ditahun 1970-an mulai mengkaji ulang indikator tingkat pencapaian pembangunan dari tujuan yang telah ditetapkan dari suatu Wilayah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Pembangunan

Basis atau pendekatan	Kelompok	Indikator-indikator
Tujuan Pembangunan	Pertumbuhan, produktivitas dan efisiensi	Pendapatan Wilayah, PDRB, PDRB prkapita, pertumbuhan PDRB. Kelayakan finansial dan ekonomi. Spesialisasi, keunggulan komparatif dan kompetitif: LQ dan Shift-Share.
	Pemerataan, keberimbangan, keadilan (equity).	Distribusi pendapatan; Gini Ratio. Ketenagakerjaan; pengangguran terbuka, terselubung, setengah pengangguran. Kemiskinan; Good service ratio, konsumsi makanan, garis kemiskinan. Regional balance; spatial balance, sentral balance, capital balance, sectoral balance.
	Keberlanjutan (Sustainability)	Dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial.
Sumber daya	Sumberdaaya manusia. Sumber daya alam. Sumber daya buatan atau sarana prasarana. Sumber daya sosial.	Pengetahuan, skill, etos kerja, kompetensi, pendapatan, kesehatan dan IPM. Degradasi Skalogram, aksesibilitas terhadap fasilitas. Organisasi sosial, aturan adat atau budaya.
Proses pembangunan	Input, implementasi, output, outcome, benefit, impact	Input dasar (SDM, SDA, infrastruktur, SDS), input antara

Sumber : Rustiadi (2009)

Pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan menurut Kuznet (1966) dalam Rustiadi (2009) dinyatakan bahwa bagi negara yang pendapatannya rendah, bertumbuhnya perekonomian harus mengorbankan pemerataan (terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan). Hal inilah yang memberi legitimasi pemerintah untuk memusatkan pengalokasian sumber daya pada sektor atau Wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi. Kasus di Indonesia strategi ini telah membuat ketimpangan pembangunan Wilayah yang lebih besar dan tidak adanya keterpaduan pembangunan Wilayah, Hadi (2001).

Paradigma baru pembangunan diarahkan kepada terjadinya pemerataan, pertumbuhan dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi. Paradigma baru ini dapat mengacu kepada apa yang disebut dalil kedua fundamental ekonomi kesejahteraan bahwa sebenarnya pemerintah dapat memilih target pemerataan ekonomi yang diinginkan melalui transfer, perpajakan dan subsidi, Rustiadi (2009).

2.2.3. PDRB Per Kapita

produk domestik regional bruto (PDRB) adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi suatu Wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi (BPS, 2016). Nilai tambah bruto adalah selisih dari nilai output dan biaya antara dalam proses produksi. Output adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia disuatu Wilayah.

PDRB yang meningkat akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan secara makro. Meskipun belum tentu menjamin pemerataan pendapatan antar golongan penduduk, namun sejauh ini data PDRB masih cukup mampu untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu Daerah. PDRB per kapita diperoleh dari total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB prkapita dapat di pakai sebagai indikator produktivitas rata-rata penduduk suatu Daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar hargakonstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Besarnya PDRB atas dasar harga konstan tahun ini (t) dikurangi tahun sebelumnya ($t-1$) dikalikan seratus persen menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun ini (t). Untuk memudahkan teori-teori pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan maka uraian ini dikaitkan dengan teori-teori akumulasi modal, kondisi mapan (steady state) dan konvergensi.

2.2.4. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Para ekonom pada umumnya memberikan pengertian yang sama mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai kenaikan GDP/GNP saja tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak, Arsyad (1999). Menurut Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan

kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat inmaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas, Arsyad(1999).

Menurut Boediono ada 3 (tiga) aspek dalam definisi proses output per kapita dan jangka panjang. Aspek pertama, Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dapat dilihat aspekdinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, Boediono(1985).

Aspek kedua, Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi, proses kenaikan output prkapitaharus dianalisa dengan melihat output total disatu pihak dan jumlah penduduk dilain pihak, Boediono (1985).

Aspek ketiga, dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau 2 (dua) tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengalami kenaikan output per kapita, Boediono (1985).

2.2.5. Teori Pertumbuhan Solow

Teori pertumbuhan Solow merupakan representasi dari teori pertumbuhan Neo-Klasik, dengan kata lain, proses pertumbuhan maupun determinan pertumbuhan yang dikemukakan Solow berikut ini juga merepresentasikan konsep dari aliran Neo-Klasik. Determinan pertumbuhan menurut Solow:

1. Akumulasi Modal

Menurut Solow dalam Mankiw (2007) modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi (*depreciation*) mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang.

2. Tabungan

Model Solow dalam Mankiw (2007) menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Apabila tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang

besar dan tingkat output yang tinggi. Bila tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Jadi tabungan berpengaruh terhadap pertumbuhan melalui akumulasi modal atau persediaan modal yang dibentuk oleh tabungan. Meski menurut Solow tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi itu hanya bersifat sementara. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka hal itu akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi tetapi tidak mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya.

3. Pertumbuhan Populasi

Menurut Mankiw (2007), pertumbuhan populasi membedakan model Solow dalam tiga cara. Pertama, pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun demikian, karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat n , modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat n . Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dalam standar kehidupan (karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi mapan), pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan.

Kedua, pertumbuhan populasi memberikan kita penjelasan lain mengapa sebagian negara adalah kaya dan sebagian lain miskin. Jadi, model Solow

memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per orang yang lebih rendah. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria untuk menentukan tingkat modal kaidah emas (memaksimalkan konsumsi).

Meskipun dalam hal tertentu model Solow menggambarkan perekonomian negara maju secara lebih baik dari pada kemampuannya menjelaskan perekonomian negara berkembang, model ini tetap menjadi acuan dasar dalam kepustakaan mengenai pertumbuhan dan pembangunan. Model ini menyatakan bahwa secara kondisional, perekonomian berbagai negara akan bertemu (*converge*) pada tingkat pendapatan yang sama, dengan syarat bahwa negara-negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja dan produktivitas yang sama, Todaro(2006).

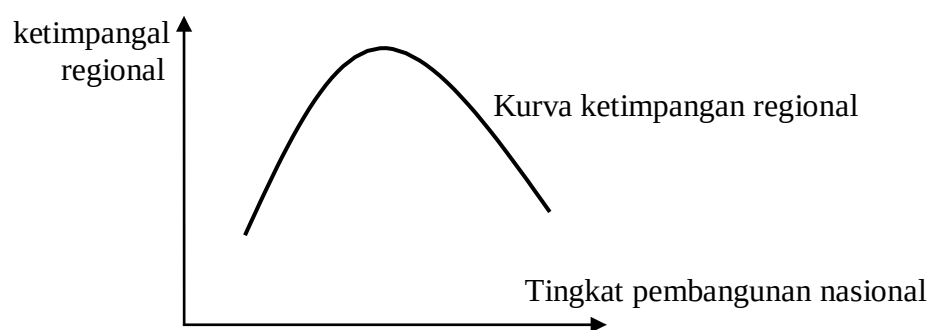
2.2.6. Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.

Isu utama masalah pembangunan regional dewasa ini adalah ketimpangan (*disparity*) yang meliputi 1) disparitas antar Wilayah, 2) disparitas antar sektor ekonomi dan 3) disparitas antar golongan masyarakat atau individu. Permasalahan ini disebabkan antara lain oleh perencanaan pembangunan yang bersifat sentralistik, *top down* dan seragam. Konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pertumbuhan dibandingkan redistribusi pendapatan yang adil, sesuai dengan keadaan budaya penguasa (rezim) yang telah menyisakan ketimpangan. Disparitas antar Wilayah berarti terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan antar Wilayah yang terjadi pada perkembangan sektor pertanian, industri, perbankan,

asuransi, transportasi, komunikasi, infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas perumahan dan sebagainya.

Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antar Wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar Wilayah. Hipotesa ini kemudian dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik.

Pada permulaan proses pembangunan menurut Hipotesa Neo-Klasik, ketimpangan pembangunan antar Wilayah cenderung meningkat sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak (*divergence*). Bila pembangunan terus berlanjut, maka setelah itu secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar Wilayah tersebut akan menurun atau berkurang (*convergence*). Dengan kata lain, berdasarkan hipotesa ini kurva ketimpangan pembangunan antar Wilayah atau ketimpangan regional adalah berbentuk huruf U terbalik.

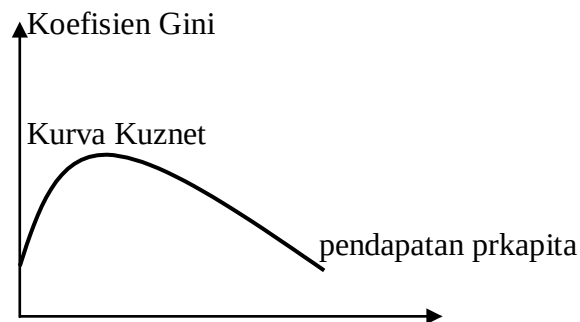


Gambar 2. 1
Kurva Hipotesis Neo-Klasik

Beberapa teori pembangunan dan pertumbuhan telah membuktikan bahwa ketimpangan pembangunan dan ketidak seimbangan melekat dalam setiap tahap pembangunan. Gunnar Myrdal, dalam Jhingan, (2003), mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab akibat sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan lebih banyak dan mereka yang tertinggal dibelakang menjadi semakin terhambat. Dampak Balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) cenderung mengecil yang semakin memperburuk ketimpangan internasional dan regional di negara-negara yang sedang berkembang.

Hal ini sejalan dengan Hipotesis Kuznet mengenai relasi antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang dikenal dengan kurva U terbalik (*inverted U*). Simon Kuznet menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik, Kuncoro (2004). Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan atau dari ekonomi pertanian (tradisional) ke ekonomi industri (moderen). Pada awal proses pembangunan ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan, ketimpangan menurun yakni pada saat sektor industri sudah dapat menyerap sebagian tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil didalam produksi dan penciptaan pendapatan. Kurva (U Terbalik) dari Kuznet ini adalah penjabaran dari kurva hipotesa Neo-Klasik.

Sumbu horizontal berupa (tingkat pembangunan nasional) diproksi dengan besarnya pendapatan per kapita dan sumbu vertikal berupa variabel (ketimpangan regional) diproksi dengan kesenjangan pendapatan melalui Indeks Gini (Gini Ratio).



Gambar 2. 2
Kurva Hipotesis Kuznet

Ketimpangan pembangunan memiliki perbedaan dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan distribusi pendapatan digunakan melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, sementara ketimpangan pembangunan bukan hanya melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat tetapi juga berorientasi untuk melihat perbedaan antar Wilayah. Jadi yang dipersoalkan bukan hanya antar kelompok kaya dan miskin melainkan perbedaan antara Daerah maju dan terbelakang.

Menurut sebagian ekonom antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memiliki hubungan kausal, dimana ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan, dan sebaliknya pertumbuhan juga mempengaruhi ketimpangan. Pandangan dan debat mengenai hubungan antara ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ini sangat dipengaruhi hipotesis Kuznets (1955), dikenal dengan Kuznets Hypothesis, yang menyatakan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan dan

ketimpangan seperti U-shaped terbalik. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung buruk dan tidak akan meningkat sampai negara tersebut mencapai status berpendapatan menengah (*middle-income*). Implikasi lebih lanjut hipotesis ini sangat jelas, jika pada tahap awal pertumbuhan akan menciptakan ketimpangan, maka kemiskinan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berkurang di negara-negara berkembang.

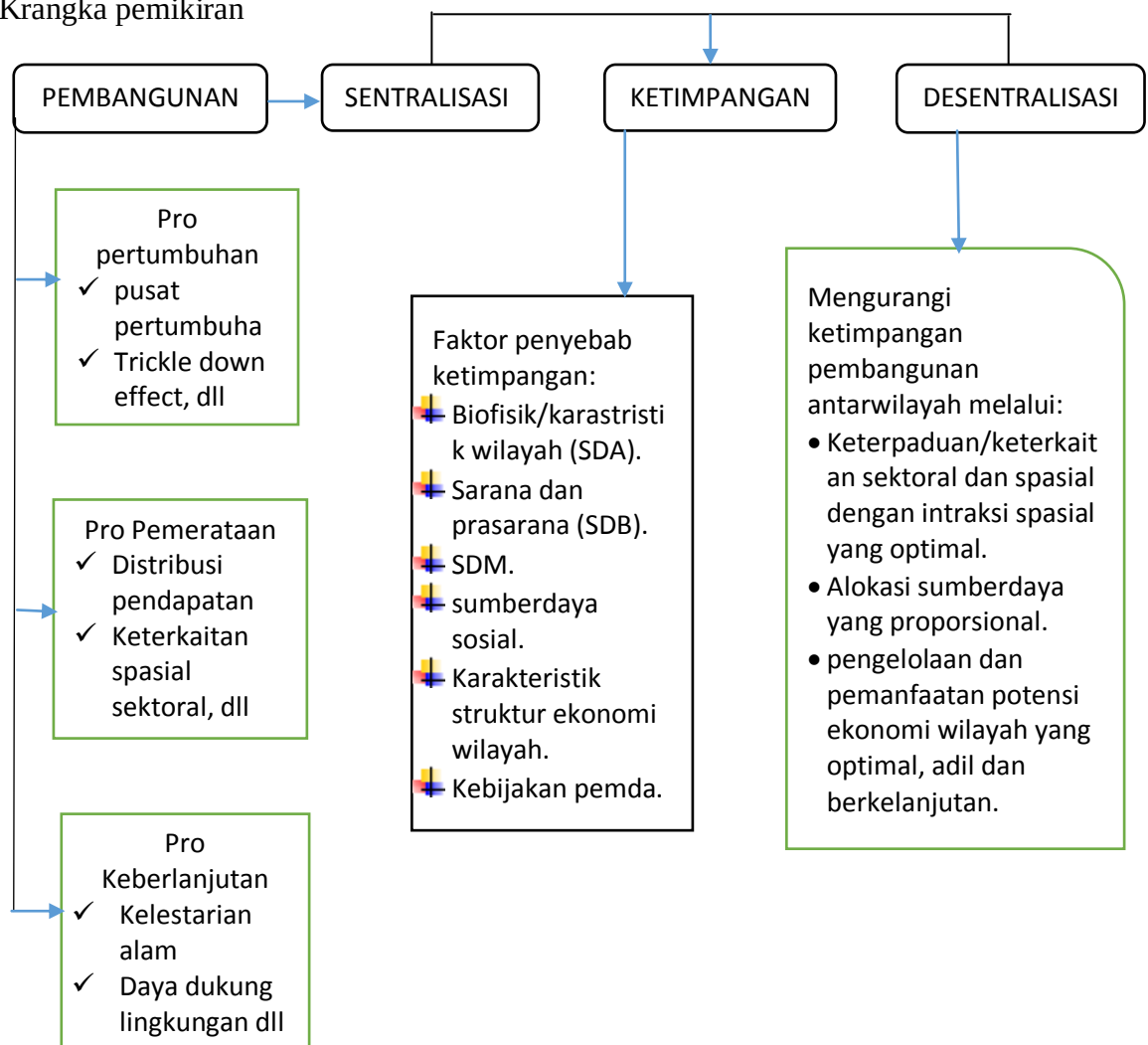
Pandangan ini didukung oleh penelitian Herwin Mapongga, (2011), pada penelitiannya yang beranggapan bahwa , hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang diukur dengan Indeks Gini lebih erat dengan Ideks Wiliamson, dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi dalam memperbesar ketimpangan pembangunan.

Tutik Yuliani, (2015), lebih mendukung pandangan yang mengatakan bahwa pertumbuhan dengan Ideks Wiliamson memiliki hubungan yang negatif, artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan akan menurun. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurva Kuznets tentang U terbalik berlaku di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.8. Krangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan rangkuman dari seluruh dasar-dasar teori yang ada dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut :

Krangka pemikiran



Gambar 2. 3

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data skunder periode waktu 2010-2016 dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: (Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu).

3.2. Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dan penjelasan berikut:

Tabel 3. 1
Operasional Variabel

No	Variabel	Batasan Pengertian	Simbol	Satuan
1	Pertumbuhan Ekonomi	Leju pertumbuhan PDRB riil dengan base year 2010	PE	%
2	Ketimpangan Pembangunan	Perbedaan pendapatan antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTB berdasarkan deviasi PDRB prkapita Kabupaten/Kota dari rata-rata PDRB prkapita Provinsi dengan menggunakan Indeks Wiliamson. Perbedaan distribusi pendapatan antara kelompok yang diukur menggunakan Indeks Gini.	Iw GR	Poin
3	PDRB per kapita	Total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang ada dalam wilayah yang bersangkutan.	Y	Rupiah
4	Penduduk	1. jumlah penduduk 1 tahun. 2. laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.	1. N 2.Pop	1. jiwa 2. %

3.3. Metode Analisis

3. 3.1. Analisis struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Analisis Shift-Share

Menurut Tarigan (2007), Formulasi *Shift Share Analysis* seperti yang dikemukakan oleh Blair (1991) sebagai berikut:

$$\Delta X_i = X_{ij}(t_0) \left(\frac{X_{..}(t_1)}{X_{..}(t_0)} - 1 \right) a + X_{ij}(t_0) \left(\frac{X_i(t_1)}{X_i(t_0)} - \frac{X_{..}(t_1)}{X_{..}(t_0)} \right) b + X_{ij}(t_0) \left(\frac{X_{ij}(t_1)}{X_{ij}(t_0)} - \frac{X_i(t_1)}{X_i(t_0)} \right) c$$

Keterangan:

a : Komponen *Regional Share*

b : komponen *Proportionality Shift*

c : komponen *Differential Shift*

ΔX_i : perubahan nilai aktifitas sektor tertentu

$X_{..}$: nilai total aktivitas dalam total wilayah

X_i : nilai total aktivitas tertentu dalam total wilayah

X_{ij} : nilai aktivitas sektor tertentu dalam sub wilayah tertentu

t1 : tahun akhir

t0 : tahun awal

Analisis ini dilakukan untuk melihat pergeseran atau perubahan aktivitas perekonomian Kabupaten Kota dari tahun 2010-2016 dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Wilayah referensi. Penelitian ini melihat perkembangan tahunan selang 2010-2016 (8 titik tahun), dengan menggunakan data PDRB yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi dan masing-masing Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat.

2. Deskripsi Komparatif dan Analisis Matriks Tipologi Daerah (*Matriks Klassen Typology*).

Deskripsi komparatif dilakukan untuk melihat perubahan struktur ekonomi termasuk didalamnya PDRB per kapita baik tingkat Provinsi maupun untuk Kabupaten Kota. Dilanjutkan dengan analisis Tipologi Daerah dengan menggunakan Matriks Klassen. Hal ini seperti dilakukan oleh Syafrizal dalam penelitiannya di Daerah Sumatera Barat tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional: Kasus Sumatera Barat dalam bukunya Ekonomi Regional Syafrizal, (2008).

Menurut Hill dalam Kuncoro (2004), analisis Tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing Daerah. Tipologi Daerah pada dasarnya membagi Daerah berdasarkan 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi Daerah dan pendapatan prkapita (PDRB per kapita). Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal, Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:

1. *High growth and high income* (Daerah cepat maju dan cepat tumbuh).
2. *High growth but low income* (Daerah berkembang cepat).
3. *Low growth and low income* (Daerah relatif tertinggal).
4. *High income but low growth* (Daerah maju tapi tertekan)

Tabel 3. 2
Tipologi Daerah:

PDRB prkapita (y) Laju pertumbuhan (r)	($y_i < y$)	($y_i > y$)
($r_i > r$)	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi
($r_i < r$)	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah

Keterangan : r : rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi.

y : rata-rata PDRB prkapita Provinsi

r_i : pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang diamati.

y_i ; PDRB prkapita Kabupaten/Kota yang diamati.

Kriteria Daerah untuk membagi Daerah Kabupaten atau Kota adalah:

1. *High growth and high income*: Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Kabupaten atau Kota di Wilayah penelitian.
2. *High growth but low income*: Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat PDRB per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten atau Kota di Wilayah penelitian.
3. *Low growth and low income*: Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten atau Kota di Wilayah penelitian.
4. *High income but low growth*: Daerah yang memiliki tingkat PDRB per kapita yang lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten atau Kota di Wilayah penelitian.

Disebut tinggi apabila indikator disuatu Kabupaten atau Kota lebih tinggi dibanding rata-rata Kabupaten atau Kota di Wilayah penelitian; digolongkan

rendah apabila indikator disuatu Kabupaten atau Kota lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten atau Kota di Wilayah penelitian.

3.3.2 Analisis ketimpangan pembangunan antar Wilayah menggunakan Indeks Wiliamson dan Indeks Gini.

1. Indeks Wiliamson

Indeks ini digunakan untuk mengukur penyebaran (dispersi) tingkat pendapatan prkapita Daerah relatif terhadap rata-rata nasional, merupakan ukuran ketimpangan pembangunan yang pertama kali ditemukan oleh JeffreyG. Wiliamson dalam studinya pada tahun 1966. Berbeda dengan Gini rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, Indeks Wiliamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar Wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Secara statistik dalam Sjafrizal (2008). Formulasinya adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot A_i / A_{tot}}}{\bar{y}}$$

Dimana:

Yi= PDRB per kapita Kabupaten/Kota i

y-= rata-rata PDRB per kapita seluruh Daerah di Provinsi NTB

Ai= jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i

Atot= jumlah penduduk di Provinsi NTB

2. Indeks Gini (Gini Index)

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2007). Fomulasi Indeks Gini atau Rasio Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n FPi(Fci + Fci - 1)$$

Dimana:

GR = Indeks Gini.

Fpi = frekuensi penduduk dalam kelas ke-i.

Fci= frekuensi kumulatif dan total pengeluaran/pendapatan pada kelas ke-i.

Fci= frekuensi kumulatif dan total peneluaran/pendapatan pada kelas ke (i-1).

Nilai angka Indeks yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari nol menunjukan ketimpangan yang semakin melebar.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

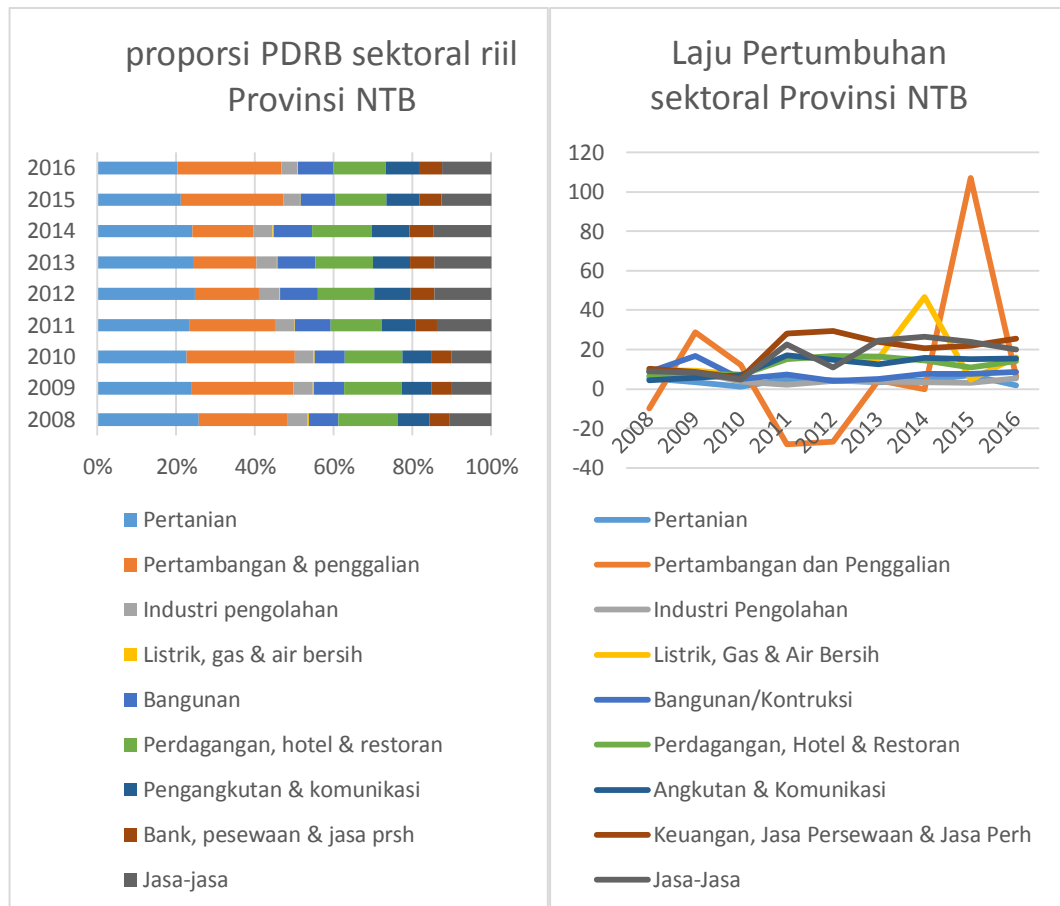
Bagian ini akan disajikan secara beruntun mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data penelitian guna menjawab tujuan penelitian yaitu menganalisis pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis data meliputi Shift Share, Tipologi Klassen, Indeks Kesenjangan Williamson, dan Indeks Gini.

4.1.1 Struktur Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bebagai aktivitas perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah berperan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB. Kondisi geografis dan alam Provinsi NTB menjadikan aktivitas dibidang pertanian, pertambangan dan penggalan menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi di antara bidang-bidang lainnya. Sehingga dalam struktur ekonomi NTB bidang-bidang tersebut mendominasi pembentukan PDRB, peranan sektor pertanian menjadi yang tertinggi dengan rata-rata kontribusi 23,35% pertahun diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalan, dan perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata 21,98% dan 14,21% pertahun.

Meskipun pertanian merupakan penyumbang terbesar, namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi sektoral relatif rendah, hanya rata-rata 4,06% per tahun. Pertumbuhan ini relatif kecil dibandingkan dengan laju sektor listrik yang memiliki kontribusi tidak cukup 1% namun memiliki laju pertumbuhan rata-rata 15,68% per tahun. Laju pertumbuhan sektor pertanian terbesar adalah pada tahun 2015 (6,91%) dan terendah pada tahun 2010 (1,33 %). Sektor yang memiliki rata-rata

petumbuhan terbesar adalah jasa keuangan (19.33%), jasa-jasa (16,72%), dan listrik (15,68%) seluruh sektor pertumbuhannya fluktuatif.



Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4.1
PDRB Sektoral dan Laju Pertumbuhan

Terdapat kesenjangan dalam struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jika antara kontribusi dan pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi sektoral) ini dikaitkan dengan kontribusi dan pertumbuhan tenaga kerja sektoral. Misalnya untuk sektor pertanian dari tahun 2009-2014 memiliki kontribusi PDRB sektoral di atas 20%, relatif terbesar dengan sektor lainnya. Demikian halnya dengan kontribusi tenaga kerja sektoralnya yang mencapai separuh dari total penggunaan tenaga kerja yang ada di Nusa Tenggara Barat. Namun kontribusi

PDRB sektor pertanian yang relatif besar ini hanya diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB) yang relatif rendah dibandingkan sektor lainnya, dari 3,54 pada tahun 2009 menjadi 4,46 pada tahun 2014. Bandingan dengan sektor keuangan yang hanya memiliki kontribusi PDRB 5,15% di tahun 2009 menjadi 6,18% di tahun 2014 tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sektor pertanian, yaitu dari 8,60% di tahun 2009 menjadi 20,72% di tahun 2014.

Ketimpangan ini didukung juga dengan perbedaan kontribusi dan laju pertumbuhan tenaga kerja sektoral. Sektor pertanian bukan hanya memiliki kontribusi PDRB yang terbesar, tetapi juga tenaga kerja sektoral terbesar 44,94% di tahun 2009 menjadi 43,13% di tahun 2014, dengan kontribusi PDRB terbesar yang diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi relatif rendah, kontribusi tenaga kerja sektor pertanian juga diikuti oleh penurunan tenaga kerja, hal ini salah satu penyebab laju pertumbuhan ekonomi sektoral semakin rendah, dikarenakan ada proporsi tenaga kerja yang semakin berkurang, terjadi perubahan proporsi tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sektor-sektor yang memiliki kontribusi PDRB yang relatif kecil justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan tren kontribusi tenaga kerja sektoral yang relatif tinggi dan laju pertumbuhan tenaga kerja sektoral yang jumlahnya cenderung meningkat. Seperti halnya yang terjadi pada sektor keuangan yang memiliki kontribusi PDRB yang relatif kecil dan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, namun sektor keuangan memiliki kontribusi tenaga kerja sektoral yang relatif

tinggi dibandingkan sektor pertanian, kontribusi tenaga kerja sektor keuangan sebesar 0,73% di tahun 2009 menjadi 1,40% di tahun 2014.

Penurunan yang terjadi pada tingkat partisipasi angkatan kerja dari 68,66% di tahun 2009 menjadi 66,63% di tahun 2014. Keadaan ini menyebabkan tenaga kerja di sektor pertanian akan menerima PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan sektor keuangan dan sektor lainnya yang lebih kompetitif dari aspek tenaga kerja sektoral. Jika hal ini terjadi berlangsung dalam waktu yang lama, maka *gap* antara sektor akan semakin melebar sehingga ketimpangan pembangunan berpeluang semakin melebar pula.

4.1.1.1 Analisis *shift share*

Shift share analisis merupakan salah satu dari teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur ekonomi disuatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu atau dengan kata lain melakukan dekomposisi terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu wilayah. Hasil analisis *shift share* juga menjelaskan kemampuan berkompetisi sektor atau aktivitas tertentu disuatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah lebih luas. Dalam penelitian ini, wilayah referensi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan unit analisis adalah sepuluh Kabupaten/Kota (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima). Hasil analisis ini akan menjelaskan kinerja (*performance*) Kabupaten/Kota dan membandingkan dengan kinerja dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

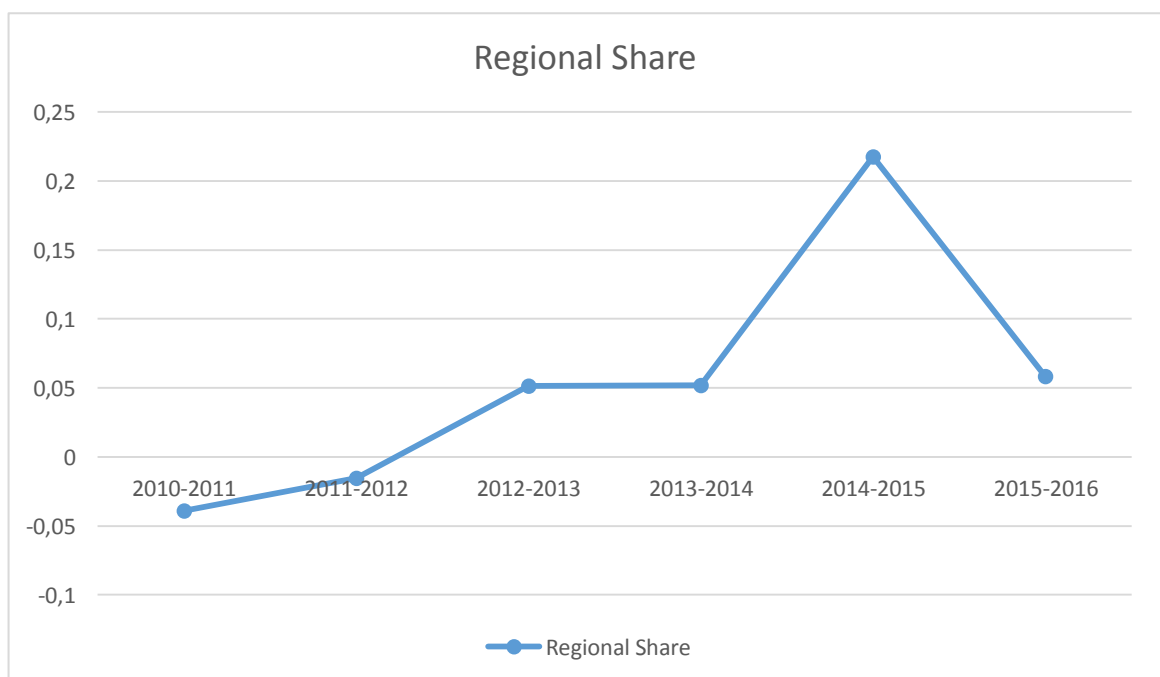
Tabel 4.1
 Nilai Analisis *Shift-Share* di Provinsi NTB rata-rata tahun 2010-2016

Uraian	Pertanian	Pertambangan & penggalian	Industri pengolahan	Listrik, gas & air bersih	Bangunan/konstruksi	Perdagangan hotel & restoran	Pengangkutan & komunikasi	Keu, prswaan & jasa persh	Jasa-jasa
Regional share		0,0541							
Proportional shift	-0,0567	-0,1380	-0,1109	0,3147	0,1239	0,2040	0,1568	0,3074	-0,0239
Differential shift									
Kab.Bima	0,0231	0,3358	0,0662	-0,0367	0,0033	0,0009	-0,0409	-0,0825	0,0070
Kab.Dompu	0,0861	0,2568	0,1277	0,1710	0,0290	-0,0495	-0,0201	-0,0996	-0,0325
Kab.Lombok Barat	-0,0439	0,2244	0,0465	-0,0284	0,0235	-0,0424	-0,0626	-0,0566	-0,0002
Kab.Lombok Tengah	-0,0141	0,3230	-0,0758	-0,1082	-0,0121	-0,0083	4,2086	-0,1181	-0,0481
Kab.Lombok Timur	-0,0468	0,3387	-0,0809	-0,0609	0,0359	0,0311	-0,0646	-0,0473	0,0315
Kab.Lombok Utara	-0,0985	0,1139	0,0499	0,0411	-0,0209	-0,1004	-0,1372	-0,3006	-0,0005
Kab. Sumbawa	0,1395	0,2454	0,0413	0,2457	-0,0549	0,0247	-0,0278	-0,0226	0,0307
Kab.Sumbawa Barat	0,0712	-0,0283	0,0417	0,4498	-0,1066	-0,0985	-0,1057	-0,1939	-0,0077
Kota Bima	-0,0938	0,0817	0,0564	0,4982	0,0163	0,0164	-0,1325	-0,2228	-0,0015
Kota Mataram	-0,1149	-0,3436	0,1479	0,0022	0,2126	0,2301	-0,7214	0,3286	0,1848
SSA									
Kab.Bima	0,0205	0,2519	0,0094	0,3321	0,1813	0,259	0,17	0,279	0,0372
Kab.Dompu	0,0835	0,1729	0,0709	0,5398	0,207	0,2086	0,1908	0,2619	0,0023
Kab.Lombok Barat	-0,0465	0,1405	-0,0103	0,3404	0,2015	0,2157	0,1483	0,3049	0,03
Kab.Lombok Tengah	-0,0141	0,2391	-0,1326	0,2606	0,1659	0,2498	4,4195	0,2434	-0,0481
Kab.Lombok Timur	-0,0494	0,2548	-0,1377	0,3079	0,2139	0,2892	0,0463	0,3142	0,0617
Kab.Lombok Utara	-0,1011	0,03	-0,0499	0,4099	0,1571	0,1577	0,0737	0,0609	0,0297
Kab. Sumbawa	0,1369	0,1615	-0,0155	0,6145	0,1231	0,2828	0,1831	0,3389	0,0609
Kab.Sumbawa Barat	0,0686	-0,1122	0,0151	0,8186	0,0714	0,1596	0,1052	0,1676	0,0225
Kota Bima	0,0964	-0,0022	-0,0004	0,867	0,1943	0,2745	0,0784	0,1335	0,0287
Kota Mataram	-0,1149	-0,4275	0,0911	0,371	0,3906	0,4882	0,5105	0,6901	0,215

Sumber : Hasil Perhitungan

A. Komponen *regional share*

Nilai *regional share* menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi provinsi. Selama kurun waktu 2010-2016, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata 0,0541 atau 5,41% pertahun. Nilai ini juga menunjukkan kontribusi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi terhadap Kabupaten dan Kotanya.



Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4.2
Regional Share

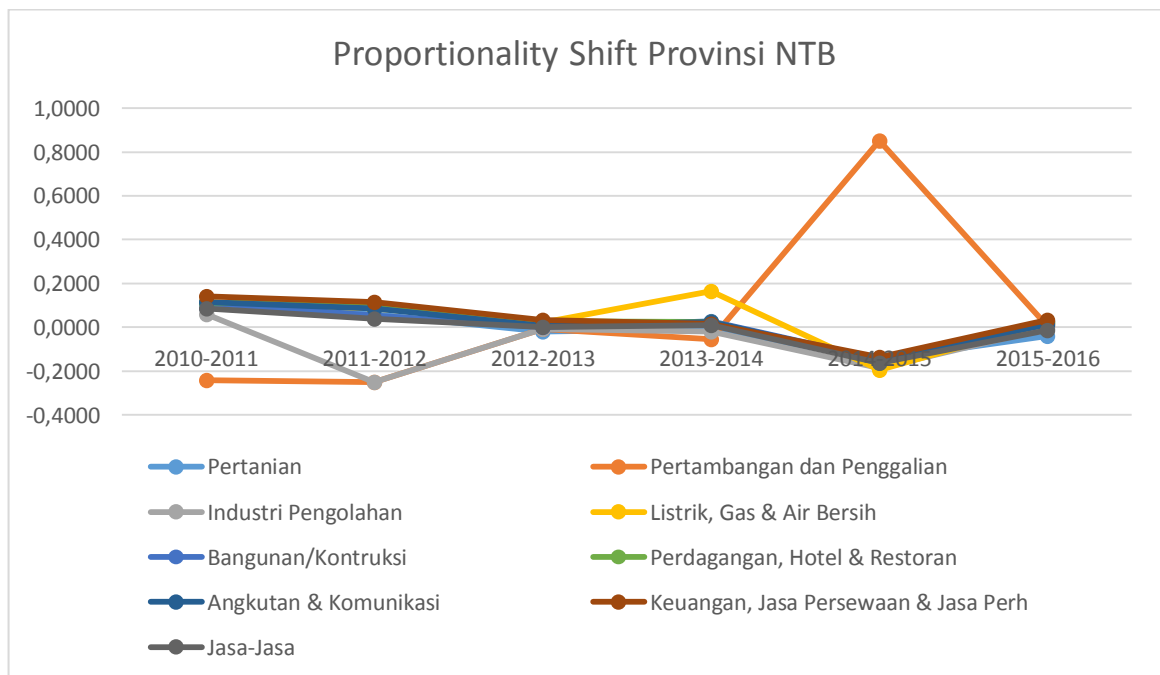
Peningkatan pertumbuhan yang cukup derastis di tahun 2015, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pertambangan dan penambahan nilai akibat diberlakukannya undang-undanga minerba pada awal tahun 2014, sehingga kegiatan pertambangan biji logam pada tahun 2015 melonjak cukup tinggi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat tergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, ketika

pertambangan dan penggalan mengalami kontraksi maka pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, seperti yang terjadi pada tahun 2016, penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya produksi konsentrat PT. Newmont Nusa Tenggara.

B. Komponen *proportionality shift*

Komponen kedua dalam analisis *shift share* adalah *proportionality shift*. Dari komponen ini diperoleh hasil secara rata-rata terhadap empat sektor yang memiliki pertumbuhan dibawah pertumbuhan provinsi, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dan jasa-jasa. Dengan kata lain keempat tersebut aktivitas ekonominya tumbuh lebih lambat dibanding ekonomi provinsi.

Sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki proporsi PDRB terbesar memiliki dinamika yang relatif konstan pada setiap wilayah. Penggunaan teknologi yang belum merata pada sektor pertanian tidak hanya berpengaruh pada sektor pertanian itu sendiri, tetapi juga pada sektor industri pengolahan yang sumber bahan bakunya berasal dari sektor pertanian, aktivitas hotel dan restoran belum optimal karena aspek pariwisata belum signifikan meningkatkan pendapatan bagi Daerah, sektor pariwisata ini baru mulai dikembangkan dua tahun terakhir ini sehingga dampak dari kegiatan sektor ini belum biasa meningkatkan pendapatan Daerah.



Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4.3
Proporsional Shift

Berdasarkan gambar perkembangan nilai *proportionality shift* di atas, sebagian besar sektor pertumbuhannya fluktuatif. Sektor yang rata-rata memiliki nilai *proportionality shift* yang positif adalah sektor listrik, bangunan, perdagangan, angkutan dan keuangan. kelima sektor memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Daerah jika pemerintah dengan serius mengembangkan dan mempehatikan sektor tersebut.

Sektor pertanian memiliki nilai negatif dikarenakan adanya penurunan tenaga kerja yang terjadi pada sektor ini, sehingga menyebabkan dalam kurun waktu penelitian ini terjadi penurunan kontribusi pada sektor ini, penurunan tenaga kerja tersebut berdampak terhadap output yang dihasilkan, penggunaan teknologi yang belum optimal juga menyebabkan sektor ini kalah bersaing.

Sektor pertambangan memiliki pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 107,07 persen, hal ini disebabkan diberlakukannya undang-undang pertambangan yang baru, sehingga produksi pertambangan kembali optimal, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar -26,28 persen, hal ini didorong oleh terjadinya kontraksi pertumbuhan lapangan usaha pertambangan biji logam yang terjadi pada PT. Newmont Nusa Tenggara di pulau Sumbawa, kontraksi ini terjadi akibat diberhentikannya produksi PT. Newmont Nusa Tenggara selama beberapa bulan, pemberhentian ini disebabkan adanya pelanggaran ekspor konsentrat.

Nilai *proporsional shift* positif adalah sektor listrik dan air bersih. Nilai *proporsional shift* positif terjadi pada sektor listrik disebabkan adanya peningkatan produksi listrik selama tahun penelitian ini, produksi listrik rata-rata tumbuh sebesar 12,2 persen pertahun, sejalan dengan peningkatan produksi distribusi listrik juga cenderung meningkat. Penjualan listrik meningkat dari 745 MWh pada tahun 2010 menjadi 1402 MWh pada tahun 2015, dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,40 persen pertahun. Peningkatan jumlah produksi listrik secara langsung dinikmati oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pelanggan listrik dari 934.299 pada tahun 2014 menjadi 1.023.233 di tahun 2015, meningkat sebesar 8,47 persen.

C. Komponen *differential shift*

Bagian terakhir dari analisis *shift share* adalah *differential shift* yaitu komponen yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Daerah pada setiap sektor karena pada kondisi spesifik Daerah yang kompetitif. Hasil dari

perhitungan pertumbuhan pada komponen ini juga dapat menggambarkan perbedaan struktur ekonomi dalam setiap wilayah pada masing-masing sektor.

Hasil dari perhitungan *differential shift* menggambarkan

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share analysis* (SSA) didapatkan sektor yang potensial dan pertumbuhan ekonomi yang terbesar di masing-masing Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat rata-rata terjadi pada sektor non pertanian (sektor tersier dan sekunder). Artinya telah terjadi transformasi struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2010-2016. Hal ini dapat diketahui dari perbandingan hasil SSA dari interval 2010-2016. Pada masing-masing wilayah diambil 3 sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar pada *komponen proporsional shift* dan *differential shift*. Di peroleh hasil bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki dekomposisi pertumbuhan yang lebih baik dari sektor primer karena memiliki koefisien terbesar. Hal ini sejalan dengan pemikiran kuznet bahwa perubahan struktur (transformasi struktural) merupakan rangkaian perubahan yang saling terkait. Perubahan yang terjadi pada sektor sekunder dan tersier disebabkan perubahan yang terjadi pada sektor primer, demikian sebaliknya. Kegiatan perekonomian perlahan beralih ke sektor sekunder dan tersier sehingga menyebabkan sektor primer semakin konstan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mapongga (2010), bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diperlukan transformasi struktur ekonomi atau perubahan struktur ekonomi, mengembangkan sektor potensial di masing-masing wilayah.

Rata-rata hasil SSA selama periode tahun 2010-2016 menunjukkan:

1. Kabupaten Bima: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,3321) lebih besar dibanding *differential shift* (-0,0367), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
2. Kabupaten Dompu: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,5398) lebih besar dibanding *differential shift* (0,1710), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
3. Kabupaten Lombok Barat: memiliki nilai SSA listrik, gas dan air bersih (0,3404) lebih besar dibanding *differential shift* (-0,0284), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
4. Kabupaten Lombok Tengah: memiliki nilai SSA sektor pengangkutan dan komunikasi (4,4193) lebih besar dibanding *differential shift* (4,2086), *proportionality shift* (0,1568). Hal ini menggambarkan sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
5. Kabupaten Lombok Timur: memiliki nilai SSA sektor keuangan, persewaan (0,3142) lebih besar dibanding *differential shift* (-0,0473), *proportionality shift* (0,3074). Hal ini menggambarkan sektor keuangan, persewaan merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
6. Kabupaten Lombok Utara: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,4099) lebih besar dibanding *differential shift* (0,0411), *proportionality shift*

- (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
7. Kabupaten Sumbawa: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,6145) lebih besar dibanding *differential shift* (0,2457), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
 8. Kabupaten Sumbawa Barat: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,8186) lebih besar dibanding *differential shift* (0,4498), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
 9. Kota Bima: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,867) lebih besar dibanding *differential shift* (0,0564), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.
 10. Kota Mataram: memiliki nilai SSA sektor keuangan, persewaan (0,6901) lebih besar dibanding *differential shift* (0,3286), *proportionality shift* (0,3074). Hal ini menggambarkan sektor keuangan, persewaan merupakan sektor yang paling kompetitif di Daerah ini.

4.1.1.2 Tipologi Klassen

Analisis tipologi klassen menggunakan data pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, maka dapat dijelaskan bagaimana keadaan struktur ekonomi suatu wilayah berdasarkan Daerah refrensinya. Demikian halnya struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita

masing-masing Kabupaten/Kota dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi sebagai Daerah referensi. Keadaan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. 2
Laju pertumbuhan ekonomia di Provinsi Nusa Tenggara Barat (persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab.bima	4,55	6,02	5,95	5,11	6,01	6,27	4,69
Kab.dompu	4,10	7,20	6,18	5,05	5,54	6,16	5,40
Kab.lombok Barat	4,92	6,05	5,27	5,26	5,70	6,39	5,73
Kab.lombok tengah	5,64	10,89	13,72	6,24	6,28	5,58	5,67
Kab.lombok timur	5,01	6,23	5,43	5,51	4,79	5,91	5,18
Kab.lombok utara	4,03	5,34	4,08	4,11	4,59	4,73	4,99
Kab.sumbawa	5,92	6,97	6,67	6,44	6,63	6,43	5,26
Kab.sumbawa Barat	12,46	-26,28	-26,27	3,53	-1,31	107,07	7,14
Kota bima	5,74	5,12	5,60	5,58	5,89	5,76	5,78
Kota mataram	7,95	2,96	1,04	7,95	8,10	7,99	8,06
Provinsi	6,11	-3,91	-1,54	5,16	5,17	21,77	5,82

Sumber: BPS, NTB dalam Angka, 2016

Tabel 4. 3
PDRB per kapita di Provinsi Nusa Tenggara Barat (juta)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab.bima	11,559	12,432	13,280	14,178	15,775	17,708	19,353
Kab.dompu	14,874	15,451	16,261	17,184	19,046	21,141	23,202
Kab.lombok Barat	11,685	12,647	13,351	14,172	15,717	17,479	19,046
Kab.lombok tengah	7,943	8,963	10,459	11,610	12,961	14,462	15,915
Kab.lombok timur	8,957	9,463	10,102	11,154	12,456	13,673	14,352
Kab.lombok utara	11,803	12,598	13,316	14,036	15,464	16,988	18,494
Kab.sumbawa	14,807	16,120	17,349	18,641	20,830	23,199	25,571
Kab.sumbawa Barat	15,812	16,980	18,721	19,521	21,180	23,011	24,800
Kota bima	13,162	13,812	14,634	15,501	17,092	18,745	20,251
Kota mataram	19,876	20,524	21,587	23,501	26,373	29,361	32,233
Provinsi	14,887	14,856	15,632	15,627	17,097	21,479	23,742

Sumber: BPS, NTB dalam Angka, 2016

Berdasarkan tabel di atas secara umum, Daerah/wilayah yang memiliki struktur ekonomi relatif baik adalah Kabupaten Kota mataram. Daerah ini memiliki nilai pertumbuhan dan PDRB per kapita diatas nilai Provinsi (*high growth and high income*) atau dapat dikatakan termasuk dalam kategori Daerah

cepat maju dan tumbuh. Sementara Kabupaten lombok utara termasuk kedalam Daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Dengan membandingkan nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita setiap Kabupaten/Kota dengan nilai provinsi, Daerah-Daerah tersebut dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu:

1. Kuadran I: *High growth and high income* (Daerah cepat maju dan cepat tumbuh)
2. Kuadran II: *High growth and low income* (Daerah berkembang cepat)
3. Kuadran III: *Low growth and low income* (Daerah relatif tertinggal)
4. Kuadran IV: *High income and low growth* (Daerah maju tapi tertekan)

Tabel 4. 4
Matriks tipologi kelas Provinsi NTB pertahun 2010-2016

PDRB per kapita (y) Laju pertumbuhan(r)	(y _i <y)	(y _i >y)
	(r _i >r)	(r _i <r)
	<p>Kuadran II</p> <p>Kab.bima: 2011,2012,2014 Bak.lombok Barat: 2011,2012,2013,2014,2016 Kab.lombok tengah:2011,2012,2013,2014,2016 Kab.lombok utara:2011,2012 Kab.lombok timur:2011,2012,2013 Kota bima:2011,2012,2013,2014,2016 Kab.dompu:2016</p>	<p>Kuadran I</p> <p>Kota mataram: 2010-2014,2016 Kab.sumbawa Barat: 2010,2015,2016 Kab.sumbawa: 2011,2012,2013,2014 Kab.dompu: 2011,2012,2014</p>
	<p>Kuadran III</p> <p>Kab.bima: 2010,2013,2015 Kab.dompu: 2010,2015 Bak.lombok Barat: 2010,2015 Kab.lombok tengah:2010,2015 Kab.lombok utara:2010,2013,2014,2015,2016 Kab.lombok timur:2010,2014,2015,2016 Kab.sumbawa: 2010, Kota bima:2010,2015,2016</p>	<p>Kuadran IV</p> <p>Kabupaten sumbawa Barat: 2011,2012,2013,2014 Kab.dompu: 2013 Kota mataram: 2015 Kab.sumbawa: 2015,2016</p>

Sumber: Hasil Perhitungan

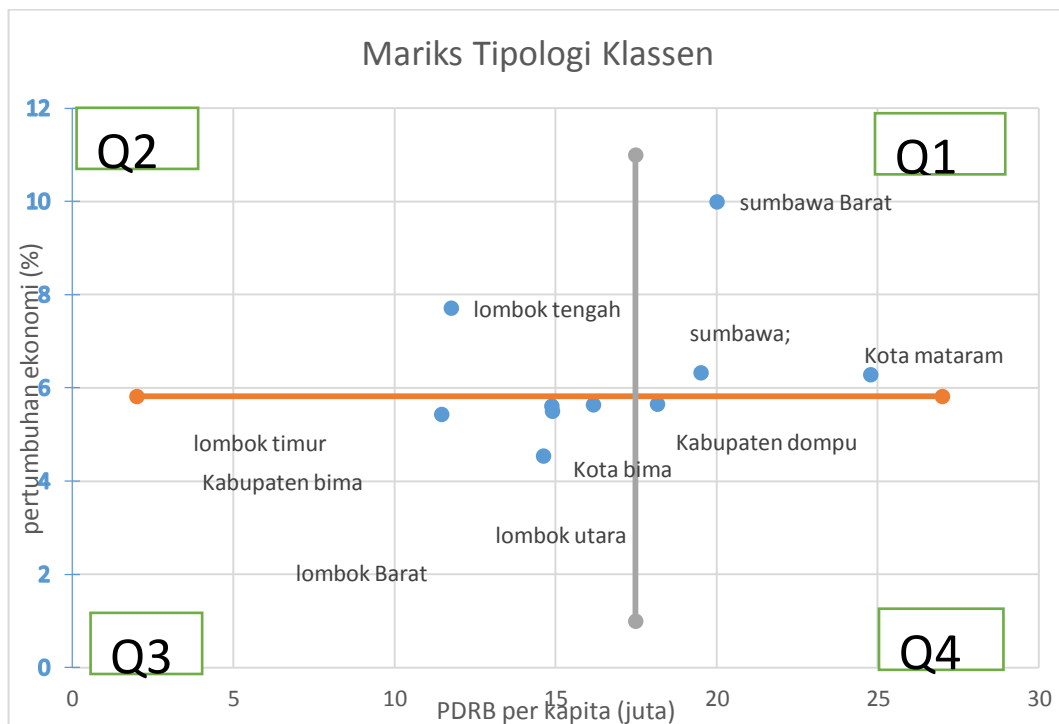
Keterangan : r : rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi.

y : rata-rata PDRB per kapita Provinsi

r_i : pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang diamati.

y_i ; PDRB per kapita Kabupaten/Kota yang diamati.

Selama tahun 2010-2016, Daerah yang paling sering sebagai Daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur. Prekonomian Lombok Utara relatif lebih tertinggal, dikarenakan Daerah yang baru mekar ditahun 2008 dan paling muda sehingga pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki belum optimal, prekonomian Daerah ini belum bisa tumbuh dan bersaing dengan prekonomian Daerah induknya yaitu Kabupaten Lombok Barat, hal ini yang mnyebabkan pertumbuhan Daerah ini tidak bisa lebih tinggi dari perekonomian Provinsi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan tinggi di tempati oleh Kota Mataram dari tahun 2010-2016 pertumbuhan Kota Mataram mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi, sejalan dengan itu pendapatan juga mengalami peningkatan yang signifikan lebih tinggi dibanding pendaptan Provinsi. Daerah yang paling sering dengan pertumbuhan rendah dan pendapatan tinggi ditempati oleh Kabupaten Sumbawa Barat, karena adanya ketergantungan prekonomian Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup besar terhadap pertambangan dan penggalian menyebabkan Kabupaten ini menjadikan Daerah yang tertekan, karena ketika pertamabngan dan penggalian mengalami kontraksi yang cukup besar, maka akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat cukup signifikan.



Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4. 4

Tipologi Klassen Privinsi NTB tahun 2010-2016

Secara agregat dari tahun 2010 ke tahun 2016, Kota Mataram merupakan Daerah yang memiliki struktur ekonomi yang lebih baik ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pada interval tersebut Kota Mataram berada pada kuadran satu sebagai Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, demikian juga dengan rata-rata tipologi klassennya. Secara rata-rata Kabupaten Lombok Timur mengalami penurunan dari kuadran dua Daerah berkembang cepat pada tahun 2011 menjadi kuadran tiga Daerah relatif terbelakang pada tahun 2016. Kabupaten Sumbawa Barat secara rata-rata mengalami peningkatan dari kuadran empat Daerah tertekan pada tahun 2011 menjadi kuadran satu Daerah cepat maju dan cepat tumbuh pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil analisis ini dapat dijelaskan bahawa struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami ketimpangan. Terdapat tiga Daerah (Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa) sebagai Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, serta satu Daerah sebagai Daerah berkembang cepat (Kabupaten Lombok Tengah), dan enam Daerah sebagai Daerah relatif tertinggal (Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima) dan Daerah maju tapi tertekan ditempati oleh Daerah Kabupaten Dompu.

Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang PDRB terbesar bagi Provinsi, secara keseluruhan masih tergolong sebagai Daerah relatif terbelakang, meskipun perekonomian secara rata-rata terspesialisai, tetapi tidak kompetitifnya perekonomian juga menyebabkan ketimpangan dan keterbelakangan di Wilayah ini. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih didominasi oleh kontribusi pertumbuhan ekonomi Provinsi. Dukungan konsentrasi penduduk terbesar yang berada di Daerah ini 24,07% dari total penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebabkan PDRB per kapita menjadi rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki 2,75% dari total penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain penduduk yang sedikit Kabupaten Sumbawa Barat adalah perusahaan pertambangan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat berlokasi di Kabupaten ini, hal ini menyebabkan PDRB per kapita Kabupaten ini menjadi tinggi, sehingga berpengaruh terhadap posisi dalam matriks klassen.

Kabupaten Sumbawa Barat jika analisisnya menggunakan data pertumbuhan ekonomi non tambang dan PDRB per kapita non tambang, Kabupaten Sumbawa Barat termasuk dalam kategori Daerah maju tapi tertekan, artinya Kabupaten Sumbawa Barat memiliki struktur ekonomi yang kurang baik, karena ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian cukup tinggi, jika kita melihat hasil analisis *Shift share*, sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Daerah ini adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai SSA negatif, hal ini disebabkan sebagian besar hasil dari pertambangan tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi kebanyakan diberikan dalam bentuk royalti.

Kabupaten Dompu masuk dalam kategori maju tapi tertekan, penyebab Daerah ini menjadi Daerah maju tapi tertekan adalah dalam kurun waktu penelitian ini sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB mengalami perlambatan, perlambatan ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.1.2 Kondisi Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Analisis ketimpangan pembangunan menggunakan nilai PDRB per kapita dan total pengeluaran/pendapatan masyarakat dapat diketahui kondisi ketimpangan dalam suatu Wilayah. Dengan nilai PDRB per kapita dapat digunakan untuk mendeskripsikan ketimpangan Wilayah melalui alat analisis

Indeks Wiliamson. Besarnya pengeluaran/pendapatan masyarakat digunakan dalam menjelaskan ketimpangan melalui Indeks Gini (Gini Ratio)

4.1.2.1 Indeks Wiliamson

Menggunakan rumus berikut diperoleh nilai Indeks Wiliamson seperti dalam grafik

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot A_i / A_{tot}}}{\bar{y}}$$

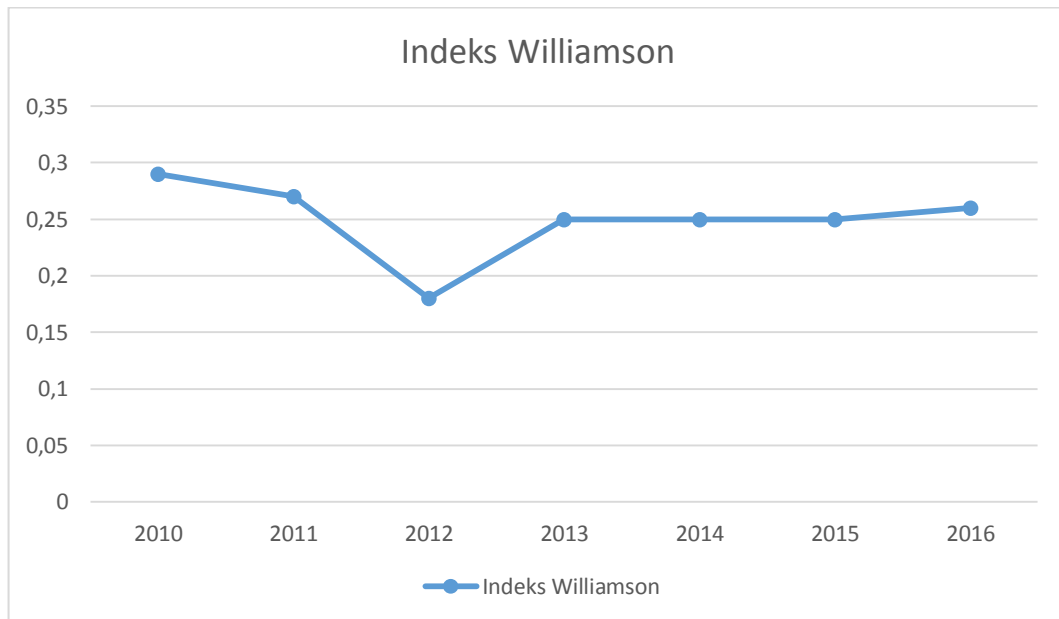
Dimana:

Y_i = PDRB per kapita Kabupaten/Kota i

y = rata-rata PDRB per kapita seluruh Daerah di Provinsi NTB

A_i = jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i

A_{tot} = jumlah penduduk di Provinsi NTB



Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4. 5
Indeks Wiliamson

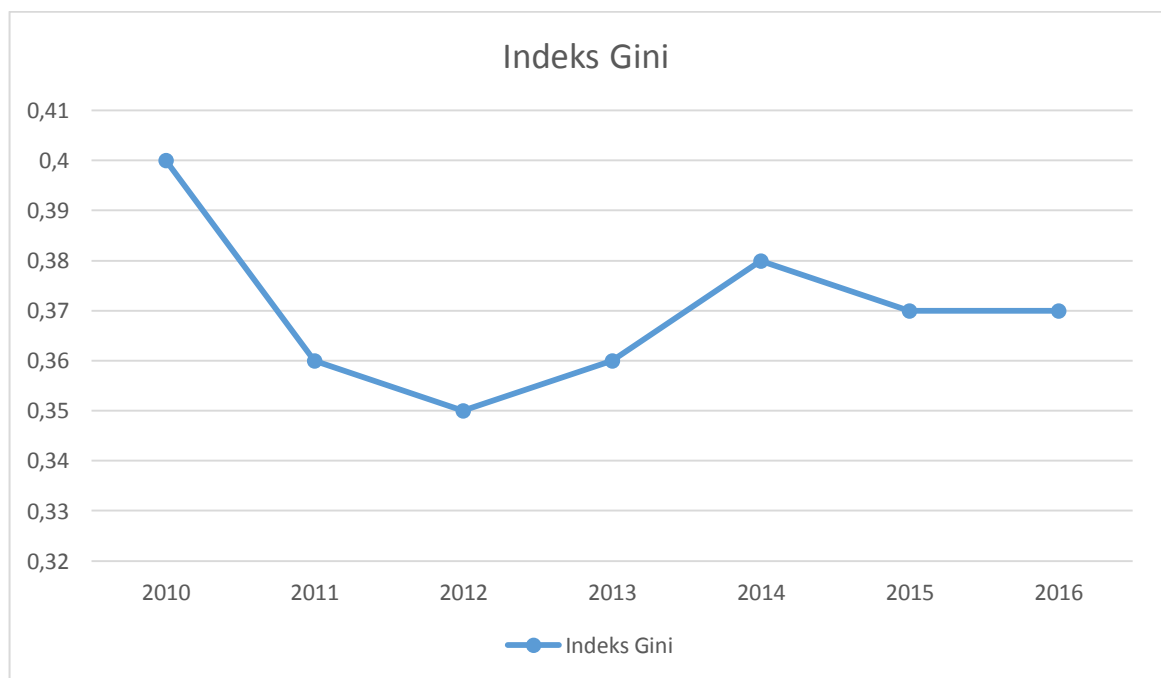
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Wiliamson menunjukkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih relatif tinggi terlihat dari besarnya *gap* antara Kabupaten/Kota dengan PDRB per kapita tertinggi dan PRDB perkapita terendah. Kota Mataram memiliki PDRB pekapita tertinggi, jauh meninggalkan Daerah lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudahan dalam mengakses hasil pembangunan menyebabkan Kota Mataram mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan Daerah lainnya, hal ini tentu tidak mengherankan karena Kota Mataram merupakan ibu Kota Provinsi yang menyebabkan Daerah ini menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Karastistik Daerah kepulauan mengakibatkan banyak warga yang sulit dicapai oleh sarana dan prasarana sosial ekonomi. Keterbatasan jalan membuat warga sulit untuk saling berhubungan dan memperoleh pelayanan yang seharusnya disediakan pemerintah, terutama untuk masyarakat pedesaan. Gunnar

Myrdal, dalam Jhingan, (2003) dalam teorinya mengenai dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*) mengemukakan bahwa dampak balik cenderung membesar dan dampak sebar yang semakin mengecil membuat ketimpangan di negara-negara terbelakang.

4.1.2.2 Indeks Gini

Indeks Gini menunjukkan fenomena yang terbalik dengan Hipotesis Neo-Klasik. Data yang diperoleh dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Indeks Gini sejak tahun 2010-2016 semakin menurun. Artinya bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat sebagai indikator dari ketimpangan semakin merata.

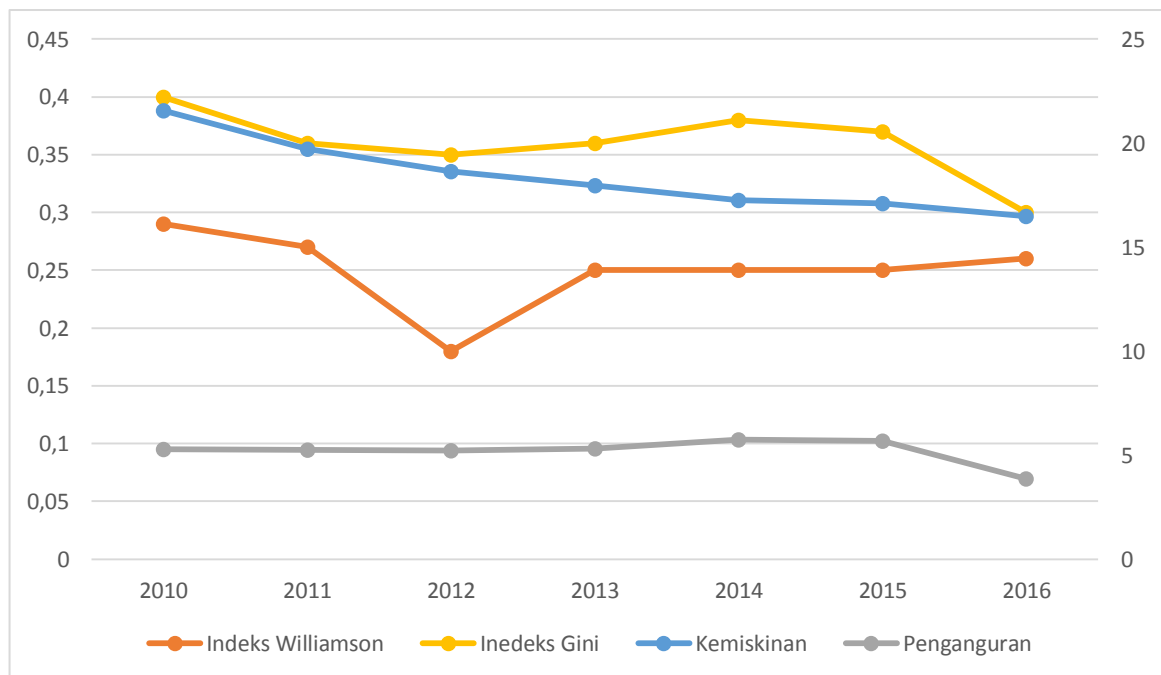


Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 4. 6
Indeks Gini

Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar Wilayah dan antar golongan pendapatan. Tingkat kesenjangan ekonomi antara

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Gini berfluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan dan masih dibawa rata-rata nasional, artinya dalam kurun waktu 2010-2016 pendapatan masyarakat cenderung merata.



Sumber : BPS, Hasil Perhitungan, 2016

Gambar 4. 7
Indeks Williamson, Indeks Gini, Kemiskinan dan Pengangguran

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara Indeks ketimpangan dengan persentase tingkat kemiskinan dan persentase jumlah pengangguran, hal ini terlihat ketika Indeks ketimpangan menurun diikuti juga dengan penurunan persentase kemiskinan begitu juga dengan persentase penganggura.

Hubungan Indeks Williamson dengan tingkat pengangguran, jika dilihat pada tabel 4.7 indeks williamson dengan tingkat pembangunan memiliki hubungan terlihat ketika indeks ketimpangan turun atau naik dari tahun 2010-2015, diikuti

juga dengan penurunan atau kenaikan tingkat pengangguran, namun pada tahun 2016 walaupun indeks ketimpangan meningkat namun tidak diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran, artinya pada periode penelitian ini indeks ketimpangan yang diwakili oleh indeks Williamson memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran, temuan ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lessman (2006), melihat kondisi demografi dari sisi tingkat pengangguran suatu daerah, ia mengatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah.

Hubungan Indeks Gini dengan kondisi kemiskinan (persentase penduduk miskin) dari tahun 2010-2012 naik turunnya Indeks ketimpangan seiring pola perubahan persentase kemiskinan dan pengangguran, akan tetap pada tahun 2013-2016 walaupun indeks ketimpangan meningkat persentase penduduk miskin tetap menurun. Artinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Field (1989), dimana ia menyatakan tidak ada hubungan sistematis antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini diperkuat dengan pendapat Dollar dan Kraay (2002), dimana ia menyatakan secara rata-rata pendapatan kelompok termiskin dalam masyarakat akan meningkat secara proporsional dengan peningkatan pendapatan rata-rata. Chen dan Ravallion (1997), juga menyatakan bahwa perubahan pendapatan dan perubahan ketimpangan tidak berkorelasi.

Hubungan Indeks Gini dengan pengangguran naik turunnya indeks ketimpangan seiring dengan pola perubahan persentase pengangguran, artinya ada

hubungan yang positif antara ketimpangan pendapatan dengan persentase pengangguran. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfie (2014), menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, maka pendapatan per kapita akan meningkat, sehingga dapat menurunkan kesenjangan pendapatan disuatu daerah.

Perbedaan kondisi ketimpangan yang dihasilkan Indeks Wiliamson dimungkinkan terjadi karena aspek yang digunakan dalam Indeks Wiliamson adalah data PDRB per kapita. PDRB ataupun PDRB per kapita bisa saja menunjukkan nilai yang tinggi, karena yang dihitung adalah nilai produksi, sementara Indeks Gini menggunakan data pengeluaran/kemampuan masyarakat, jadi yang dilihat adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Struktur Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal ini diketahui dari nilai *shift share* sektor primer yang negatif, artinya ada penurunan kontribusi yang terjadi dalam sektor primer, kecenderungan penurunan ini terjadi secara keseluruhan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama tahun penelitian tingkat pertumbuhan pada sektor primer mengalami penurunan. Berbeda dengan sektor sekunder dan tersier yang secara terus menerus dalam kurun waktu penelitian ini kontribusinya selalu meningkat dan tingkat

pertumbuhan pada kedua sektor ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perubahan perhatian pemerintah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

4.2.2 Tipologi Klassen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang termasuk Daerah maju adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Daerah tersebut dikatakan maju karena ketiga Daerah tersebut dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat masuk dalam kategori Daerah maju dikarenakan Daerah ini menjadi pusat pertumbuhan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedua Daerah ini memiliki potensi pertumbuhan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal ini menyebabkan tingkat PDRB dan pertumbuhan ekonomi kedua Kabupaten ini cukup tinggi.

Kabupaten Domu masuk dalam kategori Daerah tertekan dan Kabupaten yang masuk dalam kategori relatif tertinggal yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima Dan Kota Bima.

Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam kategori Daerah berkembang cepat, disebabkan adanya kebijakan pemerintah Provinsi secara agresif dalam membangun *spot-spot* wisata yang ada di semua Daerah, Kabupaten Lombok Tengah menjadi fokus utama pemerintah Provinsi dalam membangun pariwisata, selain itu dipindahkannya bandar udara dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok

Tengah ikut serta dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Meski demikian keberadaan kedua elmen pendorong pertumbuhan tersebut belum bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat setempat, pertumbuhan pendapatan per kapita yang tidak terlalu besar menjadi salah satu indikator yang menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Lombok Tengah belum menikmati hasil pembangunan secara maksimal.

4.2.3 Tingkat Kesenjangan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Gini di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang signifikan selama tahun penelitian 2010-2016. Penurunan nilai Indeks Gini menggambarkan distribusi pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin merata. Indeks Gini yang menurun menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat, hal ini dikarenakan Indeks Gini dihitung dengan tingkat pengeluaran per kapita setiap penduduk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif tinggi, hal ini digambarkan dengan adanya peningkatan nilai Indeks Williamson dalam kurun waktu 2013-2016, 0,25 pada tahun 2013 menjadi 0,27 pada tahun 2016. Peningkatan Indeks Williamson ini diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang agresif dalam pembangunan, mulai dari pembangunan pariwisata, pembangunan kawasan ekonomi khusus (MANDALIKA) dan pembangunan jalan secara besar-besaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi

Sektor potensial dan memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi pada sektor non pertanian (sektor tersier dan sekunder). Artinya telah terjadi transformasi struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2010-2016. Perbandingan hasil SSA dalam interval tahun 2010-2016 jika diambil 3 sektor pada masing-masing wilayah yang memiliki nilai pertumbuhan terbesar pada komponen *proportionality shift* dan *differential shift*. Diperoleh hasil bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki dekomposisi pertumbuhan yang lebih baik dari sektor primer karena memiliki nilai koefisien terbesar.

2. Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi klassen

Berdasarkan tipologi klassen menunjukkan bahwa.

- a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) meliputi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat Dan Kota Mataram.
- b. Daerah dengan maju tapi tertekan (*high income and low growth*) meliputi 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Dompu.

- c. Daerah yang berkembang cepat (*high growth and low income*) meliputi 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Tengah
- d. Daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) meliputi 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima Dan Kota Bima.

3. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Gini

Selama periode penelitian 2010-2016 terjadi penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dilihat dari penurunan nilai indeks Gini yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2010-2016, Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010 sebesar 0,4 menjadi 0,3 pada tahun 2016. Artinya ada kecenderungan pemerataan pendapatan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode penelitian ini.

4. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Wiliamson

Selama periode penelitian 2010-2016 terjadi penurunan ketimpangan PDRB per kapita antara Kabupaten/Kota cukup signifikan (relatif merata). Seperti Indeks Wiliamson pada tahun 2010 sebesar 0,29 menurun menjadi 0,18 di tahun 2012, namun Indeks Wiliamson kembali mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,25 menjadi 0,27 di tahun 2016. Hal ini berarti membuktikan bahwa semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka tingkat kemungkinan ketimpangan yang akan terjadi semakin tinggi.

5. Kondisi Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penurunan kedua Indeks ketimpangan dalam penelitian ini diikuti juga dengan penurunan indikator makro ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat,

seperti yang terjadi pada tingkat persentase pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan, persentase pengangguran sebesar 5,29 persen pada tahun 2010, menjadi 3,86 pada tahun 2016. Selain pengangguran tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2010 sebesar 21,55 persen menjadi 16,49 persen di tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa adanya hubungan yang positif antara Indeks ketimpangan dengan pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5.2 Implikasi

1. Perekonomian sektor pertanian harus diprioritaskan, karena sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja agar dapat menurunkan tingkat pengangguran. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah penelitian, penyuluhan dan perbaikan infrastruktur dasar yang diperlukan dalam pembangunan pertanian dan jasa, seperti pengadaan jalan, jembatan, sistem irigasi dan sebagainya.
2. Daerah yang relatif tertinggal diharapkan mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, membangun infrastruktur untuk memudahkan mobilitas barang dan jasa, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat atau sentra ekonomi di Daerah melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pembangunan ataupun kesenjangan pendapatan perlu diketahui secara mendasar, seperti aliran modal yang tidak merata, infrastruktur dan sumber daya. Sarana dan prasarana publik perlu ditingkatkan di Daerah yang relatif terbelakang untuk

memudahkan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat, karena Daerah terbelakang selalu identik dengan tingkat produktifitas masyarakat yang rendah, produktifitas rendah menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses pendapatan yang lebih layak.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin, (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Aswadi, H & Kuncoro, M. (2002), Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.17, No. 1, 2002, 27-45
- Boediono, (1985), Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Bhinadi, A. (2003), Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar Jawa 1987-2000. Jurnal Ekonomi Pembangu. Vol. 8 No.1, 2003, 39-48.
- Badan Pusat Statistik [BPS] (2000), Pedoman Penghitungan PDRB Kabupaten, Buku II, Contoh Penghitungan. BPS Jakarta
- Badan Pusat Statistik [BPS](2015), Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Barat 2015, Nusa Tenggara Barat: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS](2016), Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Barat 2016, Nusa Tenggara Barat: BPS.
- Djojohadikusumo, S. (1994), Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- Hadi, S. (2001), Studi Dampak Kebijakan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi AntarWilayah: pendekatan Model Neraca Sosial Ekonomi (disertasi). Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.
- Lessman, C. (2006). *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A panel data aproach for OECD countries*. Ifo Working Papes. <http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1197172.PDF>
- Mopangga, H. (2011), Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo 2001-2008. Jurnal Tikonomika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas negeri Gorontalo, Vol 10, No. 1, 2011, 40-51.
- Mankiw, G. (2007), Makroekonomi, Edisi Keenam, Terjemahan, Jakarta. Penerbit Erlangga.

- Rustiadi, E. (2007), *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Sjafrizal. (2008), *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media
- Tarigan, R. (2007), *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tambunan, T. H. (2001), *Transformasi Ekonomi Indonesia (Teori dan Penemuan Empiris)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Todaro, M. P & Smith, S. C. (2006), *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan H. Munadar, Edisi Kesembilan Jilid I. Jakarta: Erlangga
- Ulfie Efriza. (2014), *Analisis Kesenjangan Pendapatan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Di Era Desentralisasi Fiskal*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Wijayanto, A, T. (2016), *Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16, No. 02, 418-428.
- Yogyadipratam, P, I. Prasetyo, Eko, P dan Fafuradi. (2016), *Analisis Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antara Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah Di Era Otonomi Daerah 2002-2011*. Economics Development Analysis Journal. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Vol, 5. No. 2.2016.
- Yuliani, T. (2015), *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antara Kabupaten Di Kalimantan Timur 2010-2012*. Jurnal JEJAK journal of economics and policy. Vol 8, No. 1, 46-53.

LAMPIRAN

PDRB Riil Provinsi NTB tahun 2010-2016

Tahun 2010										
Daerah	pertanian	pertambangan & penggalan	industri penglahan	listrik, gas & air minum	bangunan atau kontruksi	perdagangan hotel & restoran	pengangkutan & kamunikasi	keuangan perusahaa & jasa peushaan	jasa-jasa	jumlah
kab. Bima	2.449.315	148.885	130.096	5.087	315.905	712.785	445.047	253.759	633.393	5.094.272
kab. Dompu	1.264.396	91.008	80.557	2.006	257.766	469.890	199.540	180.124	539.587	3.084.874
kota bima	308.644	8.424	70.569	3.310	170.414	425.481	234.878	139.117	497.127	1.857.963
kota mataram	384.473	925	851.466	21.239	765.630	1.363.523	1.986.406	861.650	1.912.118	8.147.430
kab. Lomбок barat	1.627.627	470.604	383.304	13.060	910.993	1.270.943	825.502	383.394	1.125.892	7.011.320
kab. Lombok tengah	2.205.482	307.114	534.991	13.995	944.482	845.284	361.875	394.278	1.225.569	6.833.070
kab. Lombok timur	2.829.121	517.316	931.149	13.078	1.003.184	1.314.130	562.395	460.578	1.452.476	9.083.426
kab. Lombok utara	909.211	92.592	37.406	4.677	203.345	419.821	176.133	160.478	365.710	2.369.373
kab. Sumbawa	2.471.911	199.142	156.066	7.515	880.753	921.707	329.893	323.151	885.777	6.175.916
kab. Sumbawa barat	488.841	18.635.078	35.331	2.687	262.673	382.224	230.494	127.109	300.617	20.465.055
Provinsi	14.939.022	20.471.115	3.210.934	86.653	5.715.145	8.125.788	5.352.163	3.283.639	8.938.268	70.122.726

Tahun 2011										
Daerah	pertanian	pertambangan & penggalan	industri penglahan	listrik, gas & air minum	bangunan atau kontruksi	perdagangan hotel & restoran	pengangkutan & kamunikasi	keuangan perusahaa & jasa peushaan	jasa-jasa	jumlah
kab. Bima	2.571.569	157.818	134.437	5.364	335.563	782.821	471.633	275.811	667.228	5.402.245
kab. Dompu	1.359.764	96.521	83.392	2.122	280.398	506.068	213.296	198.063	567.397	3.307.021
kota bima	317.118	8.865	72.606	3.644	182.133	455.013	246.621	147.306	519.854	1.953.159
kota mataram	403.344	879	897.729	23.177	838.106	1.575.462	1.806.340	1.036.839	2.143.395	8.725.271
kab. Lomбок barat	1.698.513	502.919	399.206	14.051	984.237	1.360.083	880.606	418.226	1.177.544	7.435.386
kab. Lombok tengah	2.310.029	322.377	536.644	14.957	1.000.679	907.663	787.985	431.353	1.265.513	7.577.200
kab. Lombok timur	2.971.560	551.200	955.550	13.759	1.081.395	1.434.580	601.889	500.517	1.539.207	9.649.656
kab. Lombok utara	955.768	94.587	38.657	5.003	216.185	448.267	185.433	167.919	384.160	2.495.979
kab. Sumbawa	2.651.399	209.601	161.079	8.444	932.604	1.002.070	349.442	356.565	935.151	6.606.355
kab. Sumbawa barat	521.946	12.745.887	36.636	3.106	273.342	410.948	250.213	138.679	316.900	14.697.657
Provinsi	15.691.914	14.709.393	3.277.041	93.322	6.139.781	8.728.226	5.763.369	3.620.333	9.355.761	67.379.140

Tahun 2012										
Daerah	pertanian	pertambangan & penggalian	industri pengolahan	listrik, gas & air minum	bangunan atau kontruksi	perdagangan hotel & restoran	pengangkutan & kamunikasi	keuangan perusahaa & jasa peusahaan	jasa-jasa	jumlah
kab. Bima	2.713.107	169.143	140.195	5.652	351.034	850.843	503.363	299.455	690.696	5.723.488
kab. Dompu	1.462.548	102.100	88.306	2.278	292.792	541.000	227.803	215.349	579.252	3.511.428
kota bima	329.910	9.346	76.079	4.017	193.122	493.016	258.846	156.729	541.343	2.062.408
kota mataram	408.019	794	945.566	25.132	916.572	1.709.932	1.143.313	1.147.730	2.178.981	8.476.039
kab. Lombok barat	1.764.111	536.562	413.599	15.023	1.023.311	1.462.893	936.832	459.812	1.215.050	7.827.193
kab. Lombok tengah	2.373.418	338.560	545.044	15.800	1.033.913	978.704	1.592.232	451.537	1.287.231	8.616.439
kab. Lombok timur	3.104.214	591.960	1.004.266	14.567	1.134.692	1.554.455	639.181	544.974	1.585.228	10.173.536
kab. Lombok utara	983.507	95.860	40.666	5.449	226.958	475.941	194.020	176.855	398.542	2.597.799
kab. Sumbawa	2.843.375	221.615	168.255	9.321	968.882	1.089.700	374.638	389.974	981.028	7.046.787
kab. Sumbawa barat	557.044	8.751.193	38.421	3.522	287.539	446.175	273.944	149.885	328.855	10.836.577
Provinsi	16.407.442	10.788.742	3.414.874	99.913	6.366.307	9.536.915	6.165.836	3.977.625	9.583.159	66.340.812

Tahun 2013										
Daerah	pertanian	pertambangan & penggalian	industri pengolahan	listrik, gas & air minum	bangunan atau kontruksi	perdagangan hotel & restoran	pengangkutan & kamunikasi	keuangan perusahaa & jasa peusahaan	jasa-jasa	jumlah
kab. Bima	2.810.250	183.554	146.663	6.274	374.944	909.350	536.151	321.257	727.693	6.016.134
kab. Dompu	1.517.162	109.796	91.291	2.616	310.886	577.858	241.268	232.619	605.231	3.688.727
kota bima	336.300	8.954	80.022	4.836	206.178	537.566	271.494	166.851	565.341	2.177.543
kota mataram	414.558	796	989.287	26.525	995.673	1.883.759	1.228.368	1.274.786	2.335.975	9.149.726
kab. Lombok barat	1.826.032	552.012	427.079	15.747	1.085.528	1.573.094	985.461	494.794	1.278.950	8.238.698
kab. Lombok tengah	2.466.295	368.831	564.933	16.657	1.101.039	1.057.951	1.744.388	488.357	1.345.459	9.153.911
kab. Lombok timur	3.213.183	634.681	1.016.283	15.335	1.213.272	1.683.025	680.182	589.000	1.689.600	10.734.560
kab. Lombok utara	1.000.899	102.009	41.977	5.798	242.494	505.339	202.981	184.860	418.308	2.704.665
kab. Sumbawa	3.021.694	236.028	176.080	10.553	1.026.249	1.182.712	398.077	416.813	1.032.050	7.500.256
kab. Sumbawa barat	568.775	9.030.264	40.112	4.145	301.548	476.379	293.614	157.667	346.314	11.218.819
Provinsi	16.946.743	11.254.503	3.539.537	107.114	6.696.963	10.295.259	6.518.858	4.314.850	10.092.888	69.766.714

Tahun 2014										
Daerah	pertanian	pertambangan & penggalan	industri penglahan	listrik, gas & air minum	bangunan atau kontruksi	perdagangan hotel & restoran	pengangkutan & kamunikasi	keuangan perusahaa & jasa peusahaan	jasa-jasa	jumlah
kab. Bima	2.953.306	197.603	152.972	7.554	402.509	974.383	575.643	343.043	770.790	6.377.801
kab. Dompu	1.585.248	117.504	96.090	3.315	333.053	618.371	257.350	248.058	633.996	3.892.985
kota bima	348.729	9.542	83.092	6.464	219.580	576.378	287.074	176.774	598.200	2.305.834
kota mataram	425.834	798	1.043.163	31.475	1.089.465	2.058.717	1.327.635	1.386.053	2.527.321	9.890.461
kab. Lombok barat	1.861.906	589.082	444.761	18.948	1.170.634	1.683.246	1.066.195	523.236	1.350.302	8.708.308
kab. Lombok tengah	2.590.303	401.957	588.837	19.505	1.187.250	1.141.536	1.860.533	524.410	1.414.550	9.728.881
kab. Lombok timur	3.278.883	673.784	1.034.400	18.564	1.287.434	1.811.185	724.348	627.297	1.793.682	11.249.576
kab. Lombok utara	1.024.881	109.325	43.394	7.015	257.413	536.408	215.046	194.789	440.571	2.828.842
kab. Sumbawa	3.212.657	251.975	184.759	13.478	1.090.429	1.283.125	424.383	448.432	1.087.941	7.997.178
kab. Sumbawa barat	601.063	8.781.759	41.625	5.296	319.801	496.186	298.546	165.988	361.365	11.071.628
Provinsi	17.702.366	11.238.698	3.658.662	130.299	7.219.308	11.075.936	7.020.324	4.606.065	10.721.306	73.372.964

Tahun 2015										
Daerah	pertanian	pertambangan & penggalan	industri penglahan	listrik, gas & air minum	bangunan atau kontruksi	perdagangan hotel & restoran	pengangkutan & kamunikasi	keuangan perusahaa & jasa peusahaan	jasa-jasa	jumlah
kab. Bima	3.145.730	213.147	159.478	7.771	432.761	1.030.403	610.565	368.031	809.995	6.777.880
kab. Dompu	1.684.927	124.266	101.585	3.244	355.549	655.784	275.802	263.955	667.649	4.132.761
kota bima	362.720	10.247	86.266	6.190	234.126	617.884	304.471	188.081	628.576	2.438.561
kota mataram	440.197	800	1.104.280	33.099	1.187.081	2.226.458	1.442.943	1.528.879	2.716.636	10.680.375
kab. Lombok barat	1.981.102	631.917	466.433	19.810	1.257.848	1.768.685	1.148.566	563.264	1.427.306	9.264.932
kab. Lombok tengah	2.739.030	430.616	602.137	20.334	1.271.398	1.204.069	1.947.896	562.772	1.493.608	10.271.862
kab. Lombok timur	3.459.995	733.284	1.054.444	19.352	1.383.924	1.940.050	767.615	675.142	1.883.651	11.917.457
kab. Lombok utara	1.056.700	115.507	45.648	7.390	275.748	564.404	226.928	206.141	464.315	2.962.781
kab. Sumbawa	3.432.446	268.638	191.379	13.237	1.166.105	1.350.989	458.047	483.606	1.146.026	8.510.473
kab. Sumbawa barat	639.334	20.518.229	43.121	5.208	335.683	518.512	310.623	175.844	379.193	22.925.748
Provinsi	18.924.912	23.267.235	3.772.632	133.303	7.744.389	11.680.213	7.520.873	4.975.802	11.325.221	89.344.578

Tahun 2016										
Daerah	pertanian	pertambangan & penggalian	industri pengolahan	listrik, gas & air minum	bangunan atau konstruksi	perdagangan hotel & restoran	pengangkutan & komunikasi	keuangan perusahaan & jasa keuangan	jasa-jasa	jumlah
kab. Bima	3.220.117	230.198	169.602	8.272	466.127	1.107.107	651.645	399.217	843.302	7.095.587
kab. Dompu	1.741.994	133.525	109.976	3.679	386.949	706.157	296.336	280.293	697.102	4.356.011
kota bima	369.683	10.884	91.306	7.154	253.667	667.473	322.413	199.332	657.693	2.579.604
kota mataram	452.425	802	1.179.590	35.368	1.289.947	2.430.388	1.556.892	1.709.745	2.885.947	11.541.103
kab. Lombok barat	2.030.749	675.211	492.157	21.348	1.362.559	1.918.984	1.190.849	613.088	1.490.901	9.795.845
kab. Lombok tengah	2.817.449	470.922	621.490	21.758	1.379.072	1.305.111	2.067.675	606.254	1.564.210	10.853.940
kab. Lombok timur	3.521.782	801.356	1.076.933	20.953	1.512.983	2.080.791	810.150	740.782	1.969.554	12.535.284
kab. Lombok utara	1.084.827	122.617	48.156	7.970	295.119	609.504	240.944	217.448	484.181	3.110.766
kab. Sumbawa	3.537.543	289.896	199.574	14.343	1.248.252	1.453.542	487.351	527.725	1.200.403	8.958.630
kab. Sumbawa barat	666.218	22.027.510	45.194	5.678	358.704	555.662	322.567	185.801	395.827	24.563.159
Provinsi	19.295.329	24.777.079	3.973.396	144.104	8.413.858	12.613.667	8.055.834	5.436.666	11.838.273	94.548.206

Hasil Analisis Shift Share Provinsi NTB tahun 2010-2016

Tahun	Regional Share
2010-2011	-0,039125488
2011-2012	-0,015410229
2012-2013	0,051640938
2013-2014	0,051690122
2014-2015	0,217677096
2015-2016	0,058242233
2010-2016	0,348324726

proportionality shift

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Konstruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,0895	-0,2423	0,0597	0,1161	0,1134	0,1133	0,1160	0,1417	0,0858
2011-2012	0,0610	-0,2511	-0,2511	0,0860	0,0523	0,1081	0,0852	0,1141	0,0397
2012-2013	-0,0188	-0,0085	-0,0085	0,0204	0,0003	0,0279	0,0056	0,0331	0,0015
2013-2014	-0,0071	-0,0531	-0,0180	0,1648	0,0263	0,0241	0,0252	0,0158	0,0106
2014-2015	-0,1486	0,8526	-0,1865	0,1946	-0,1449	-0,1631	-0,1464	-0,1374	0,1613
2015-2016	-0,0387	0,0066	-0,0050	0,0228	0,0282	0,0217	0,0129	0,0344	0,0129
2010-2016	-0,0567	-0,1380	-0,1109	0,3147	0,1239	0,2040	0,1568	0,3074	0,0239

Differential shift

Kabupaten Bima

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	-0,0005	0,3415	0,0128	-0,0223	-0,0121	0,0241	-0,0171	-0,0156	0,0067
2011-2012	0,0094	0,3383	0,0008	-0,0169	0,0092	-0,0058	-0,0026	-0,0130	0,0109
2012-2013	0,0029	0,0420	0,0096	0,0378	0,0162	-0,0108	0,0079	-0,0120	0,0004
2013-2014	0,0063	0,0779	0,0094	-0,0124	-0,0045	-0,0043	-0,0033	0,0003	-0,0030
2014-2015	-0,0039	-0,9916	0,0114	0,0057	0,0024	0,0029	-0,0106	-0,0074	-0,0055
2015-2016	0,0041	0,0151	0,0103	-0,0165	-0,0093	-0,0055	-0,0038	-0,0079	-0,0042
2010-2016	0,0231	0,3358	0,0662	-0,0367	0,0033	0,0009	-0,0409	-0,0825	0,0070

Kabupaten Dompu

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,0250	0,3420	0,0146	-0,0191	0,0135	0,0029	-0,0079	-0,0029	0,0048
2011-2012	0,0300	0,3243	0,0169	0,0029	0,0073	-0,0236	-0,0018	-0,0114	-0,0034
2012-2013	0,0045	0,0322	-0,0027	0,0763	0,0099	-0,0114	0,0019	-0,0046	-0,0083
2013-2014	0,0003	0,0716	0,0189	0,0507	-0,0067	-0,0057	-0,0103	-0,0011	-0,0147
2014-2015	-0,0062	-1,0127	0,0260	-0,0445	-0,0052	0,0059	0,0004	-0,0162	-0,0032
2015-2016	0,0143	0,0096	0,0294	0,0531	0,0019	-0,0031	0,0033	-0,0307	-0,0012
2010-2016	0,0861	0,2568	0,1277	0,1710	0,0290	-0,0495	-0,0201	-0,0996	-0,0325

Kabupaten Sumbawa

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,0222	0,3340	0,0115	0,0467	-0,0154	0,0131	-0,0176	0,0009	0,0090
2011-2012	0,0268	0,3239	0,0025	0,0333	0,0020	-0,0052	0,0023	-0,0050	0,0248
2012-2013	0,0298	0,0219	0,0100	0,0601	0,0073	0,0058	0,0053	-0,0160	-0,0012
2013-2014	0,0186	0,0690	0,0156	0,0607	-0,0155	0,0091	-0,0108	0,0084	-0,0081
2014-2015	-0,0006	-1,0042	0,0047	-0,0409	-0,0033	-0,0017	0,0080	-0,0018	-0,0029
2015-2016	0,0110	0,0142	-0,0104	0,0025	-0,0160	-0,0040	-0,0072	-0,0014	0,0021
2010-2016	0,1395	0,2454	0,0413	0,2457	-0,0549	0,0247	-0,0279	-0,0226	0,0307

Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,0173	-0,0346	0,0164	0,0790	-0,0337	0,0010	0,0087	-0,0115	0,0075
2011-2012	0,0216	-0,0469	0,0067	0,0632	0,0150	-0,0069	0,0250	-0,0179	0,0134
2012-2013	-0,0118	-0,0113	0,0075	0,1048	-0,0032	-0,0118	0,0145	-0,0329	-0,0001
2013-2014	0,0122	-0,0261	0,0041	0,0611	-0,0175	-0,0343	-0,0601	-0,0147	-0,0188
2014-2015	-0,0054	0,2662	0,0048	-0,0395	-0,0231	-0,0096	-0,0308	-0,0209	-0,0070
2015-2016	0,0225	0,0087	-0,0051	0,0090	-0,0179	-0,0083	-0,0327	-0,0360	-0,0014
2010-2016	0,0712	-0,0283	0,0417	0,4498	-0,1066	-0,0985	-0,1057	-0,1939	-0,0077

Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	-0,0030	0,3312	-0,0175	-0,0082	-0,0148	-0,0003	1,1007	-0,0085	-0,0141
2011-2012	-0,0182	0,3167	-0,0264	-0,0143	-0,0037	-0,0144	0,9508	-0,0519	-0,0071
2012-2013	0,0063	0,0462	0,0000	-0,0178	0,0130	0,0015	0,0383	-0,0032	-0,0080
2013-2014	0,0057	0,0912	0,0087	-0,0455	0,0003	0,0032	-0,0103	0,0063	-0,0109
2014-2015	-0,0116	-0,9990	-0,0086	0,0195	-0,0019	0,0002	-0,0243	-0,0071	-0,0004
2015-2016	0,0091	0,0287	-0,0211	-0,0110	-0,0018	0,0040	-0,0096	-0,0154	0,0020
2010-2016	-0,0141	0,3230	-0,0758	-0,1083	-0,0121	-0,0083	4,2086	-0,1181	-0,0481

Kabupaten Lombok Timur

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	-5,01314E-05	0,3470	0,0056	-0,0249	0,0037	0,0175	-0,0066	-0,0158	0,0130
2011-2012	-0,0010	0,3405	0,0089	-0,0119	0,0124	-0,0091	-0,0079	-0,0099	0,0056
2012-2013	0,0022	0,0290	-0,0245	-0,0193	0,0173	0,0032	0,0069	-0,0040	0,0127
2013-2014	-0,0241	0,0630	-0,0158	-0,0059	-0,0169	0,0003	-0,0120	-0,0025	-0,0007
2014-2015	-0,0138	-0,9820	-0,0118	0,0194	0,0022	0,0166	-0,0116	-0,0040	-0,0062
2015-2016	-0,0017	0,0279	-0,0319	0,0017	0,0068	-0,0074	-0,0157	0,0046	0,0003
2010-2016	-0,0468	0,3387	-0,0809	-0,0609	0,0360	0,0311	-0,0646	-0,0473	0,0315

Kabupaten Lombok Utara

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,0008	0,3030	0,0129	-0,0073	-0,0112	-0,0064	-0,0240	-0,0562	0,0037
2011-2012	-0,0166	0,2800	0,0099	0,0186	0,0129	-0,0309	-0,0235	-0,0455	0,0131
2012-2013	-0,0152	0,0210	-0,0043	-0,0081	0,0165	-0,0177	-0,0111	-0,0395	-0,0036
2013-2014	-0,0206	0,0731	0,0001	-0,0066	-0,0165	-0,0143	-0,0175	-0,0138	-0,0090
2014-2015	-0,0380	-1,0137	0,0208	0,0305	-0,0015	-0,0024	-0,0160	-0,0220	-0,0024
2015-2016	0,0070	-0,0033	0,0017	-0,0025	-0,0162	0,0000	-0,0094	-0,0378	-0,0025
2010-2016	-0,0985	0,1139	0,0499	0,0411	-0,0209	-0,1005	-0,1372	-0,3007	-0,0005

Kabupaten Lombok Barat

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	-0,0068	0,3501	0,0209	-0,0011	0,0061	-0,0040	-0,0101	-0,0117	-0,0008
2011-2012	-0,0070	0,3334	-0,0060	-0,0014	0,0028	-0,0171	-0,0060	0,0007	0,0075
2012-2013	0,0022	-0,0144	-0,0039	-0,0239	0,0089	-0,0042	-0,0053	-0,0087	-0,0006
2013-2014	-0,0249	0,0686	0,0077	-0,0132	0,0004	-0,0058	0,0050	-0,0100	-0,0065
2014-2015	-0,0050	-0,9976	0,0176	0,0225	0,0018	-0,0038	0,0060	-0,0038	0,0007
2015-2016	0,0055	0,0036	0,0019	-0,0034	-0,0032	0,0051	-0,0343	-0,0042	-0,0007
2010-2016	-0,0439	0,2244	0,0465	-0,0284	0,0235	-0,0424	-0,0626	-0,0566	-0,0003

Kota Mataram

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	-0,0013	0,2319	0,0337	0,0143	0,0204	0,0813	-0,1675	0,1008	0,0742
2011-2012	-0,0340	0,1693	0,0112	0,0137	0,0567	-0,0073	-0,4369	0,0083	-0,0077
2012-2013	-0,0168	-0,0401	0,0097	-0,0166	0,0344	0,0221	0,0171	0,0259	0,0189
2013-2014	-0,0174	0,0042	0,0208	-0,0298	0,0162	0,0170	0,0039	0,0198	0,0196
2014-2015	-0,0353	-1,0680	0,0274	0,0285	0,0169	0,0269	0,0156	0,0228	0,0186
2015-2016	0,0082	-0,0630	0,0150	-0,0125	0,0002	0,0117	0,0078	0,0257	0,0170
2010-2016	-0,1149	-0,3436	0,1479	0,0022	0,2126	0,2301	-0,7214	0,3286	0,1848

Kota Bima

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	-0,0229	0,3338	0,0083	0,0240	-0,0055	-0,0047	-0,0268	-0,0437	-0,0010
2011-2012	-0,0053	0,3208	0,0058	0,0318	0,0234	-0,0091	-0,0203	-0,0347	0,0170
2012-2013	-0,0135	-0,0850	0,0153	0,1317	0,0157	0,0108	-0,0084	-0,0202	-0,0089
2013-2014	-0,0076	0,0670	0,0047	0,1204	-0,0130	-0,0036	-0,0195	-0,0080	-0,0041
2014-2015	-0,0289	-0,9963	0,0070	-0,0656	-0,0065	0,0175	-0,0107	-0,0163	-0,0056
2015-2016	-0,0004	-0,0027	0,0052	0,0747	-0,0030	0,0003	-0,0122	-0,0328	0,0010
2010-2016	-0,0938	0,0817	0,0564	0,4982	0,0163	0,0164	-0,1325	-0,2228	-0,0015

Hasil Analisis Shift Share Kabupaen/Kota di Provinsi NTB

Kabupaten Bima

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,049875	0,060075	0,033375	0,054675	0,062175	0,098275	0,059775	0,086975	0,053375
2011-2012	0,05499	0,07179	-0,26571	0,05369	0,04609	0,08689	0,06719	0,08569	0,03519
2012-2013	0,035741	0,085141	0,052741	0,109841	0,068141	0,068741	0,065141	0,072741	0,053541
2013-2014	0,05089	0,07649	0,04309	0,20409	0,07349	0,07149	0,07359	0,06779	0,05929
2014-2015	0,065177	0,078677	0,042577	0,028777	0,075177	0,057477	0,060677	0,072877	0,050877
2015-2016	0,023642	0,079942	0,063542	0,064542	0,077142	0,074442	0,067342	0,084742	0,041142
2010-2016	0,314725	0,546125	0,303625	0,626325	0,475525	0,553225	0,464225	0,573225	0,331425

Kabupaten dompu

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,075375	0,060575	0,035175	0,057875	0,087775	0,077075	0,068975	0,099675	0,051475
2011-2012	0,07559	0,05779	-0,24961	0,07349	0,04419	0,06909	0,06799	0,08729	0,02089
2012-2013	0,037341	0,075341	0,040441	0,148341	0,061841	0,068141	0,059141	0,080141	0,044841
2013-2014	0,04489	0,07019	0,05259	0,26719	0,07129	0,07009	0,06659	0,06639	0,04759
2014-2015	0,062877	0,057577	0,057177	-0,02142	0,067577	0,060477	0,071677	0,064077	0,053177
2015-2016	0,033842	0,074442	0,082642	0,134142	0,088342	0,076842	0,074442	0,061942	0,044142
2010-2016	0,377725	0,467125	0,365125	0,834025	0,501225	0,502825	0,485025	0,556125	0,291925

Kabupaten Sumbawa

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,072575	0,052575	0,032075	0,123675	0,058875	0,087275	0,059275	0,103475	0,055675
2011-2012	0,07239	0,05739	-0,26401	0,10389	0,03889	0,08749	0,07209	0,09369	0,04909
2012-2013	0,062641	0,065041	0,053141	0,132141	0,059241	0,085341	0,062541	0,068741	0,051941
2013-2014	0,06319	0,06759	0,04929	0,27719	0,06249	0,08489	0,06609	0,07589	0,05419
2014-2015	0,068477	0,066077	0,035877	-0,01782	0,069477	0,052877	0,079277	0,078477	0,053477
2015-2016	0,030542	0,079042	0,042842	0,083542	0,070442	0,075942	0,063942	0,091242	0,047442
2010-2016	0,431125	0,455725	0,278725	0,908725	0,417325	0,577025	0,477225	0,633125	0,355125

Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,067675	-0,31603	0,036975	0,155975	0,040575	0,075175	0,085575	0,091075	0,054175
2011-2012	0,06719	-0,31341	-0,25981	0,13379	0,05189	0,08579	0,09479	0,08079	0,03769
2012-2013	0,021041	0,031841	0,050641	0,176841	0,048741	0,067741	0,071741	0,051841	0,053041
2013-2014	0,05679	-0,02751	0,03779	0,27759	0,06049	0,04149	0,01679	0,05279	0,04349
2014-2015	0,063677	1,336477	0,035977	-0,01642	0,049677	0,044977	0,040477	0,059377	0,049377
2015-2016	0,042042	0,073542	0,048142	0,090042	0,068542	0,071642	0,038442	0,056642	0,043942
2010-2016	0,362825	0,182025	0,279125	1,112825	0,365625	0,453825	0,399425	0,461825	0,316725

Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,047375	0,049775	0,003075	0,068775	0,059475	0,073875	1,177575	0,094075	0,032575
2011-2012	0,02739	0,05019	-0,29291	0,05629	0,03319	0,07829	1,02059	0,04679	0,01719
2012-2013	0,039141	0,089341	0,043141	0,054241	0,064941	0,081041	0,095541	0,081541	0,045141
2013-2014	0,05029	0,08979	0,04239	0,17099	0,07829	0,07899	0,06659	0,07379	0,05139
2014-2015	0,057477	0,071277	0,022577	0,042577	0,070877	0,054777	0,046977	0,073177	0,055977
2015-2016	0,028642	0,093542	0,032142	0,070042	0,084642	0,083942	0,061542	0,077242	0,047342
2010-2016	0,277525	0,533325	0,161625	0,554725	0,460125	0,544025	4,713725	0,537625	0,276325

Kabupaten Lombok Timur

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,050324	0,065575	0,026175	0,052075	0,077975	0,091675	0,070275	0,086775	0,059675
2011-2012	0,04459	0,07399	-0,25761	0,05869	0,04929	0,08359	0,06189	0,08879	0,02989
2012-2013	0,035041	0,072141	0,018641	0,052741	0,069241	0,082741	0,064141	0,080741	0,065841
2013-2014	0,02049	0,06159	0,01789	0,21059	0,06109	0,07609	0,06489	0,06499	0,06159
2014-2015	0,055277	0,088277	0,019377	0,042477	0,074977	0,071177	0,059677	0,076277	0,050177
2015-2016	0,017842	0,092742	0,021342	0,082742	0,093242	0,072542	0,055442	0,097242	0,045642
2010-2016	0,244825	0,549025	0,156525	0,602125	0,508225	0,583425	0,440525	0,608425	0,355925

Kabupaten Lombok Utara

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,051175	0,021575	0,033475	0,069675	0,063075	0,067775	0,052875	0,046375	0,050375
2011-2012	0,02899	0,01349	-0,25661	0,08919	0,04979	0,06179	0,04629	0,05319	0,03739
2012-2013	0,017641	0,064141	0,038841	0,063941	0,068441	0,061841	0,046141	0,045241	0,049541
2013-2014	0,02399	0,07169	0,03379	0,20989	0,06149	0,06149	0,05939	0,05369	0,05329
2014-2015	0,031077	0,056577	0,051977	0,053577	0,071277	0,052177	0,055277	0,058277	0,053977
2015-2016	0,026542	0,061542	0,054942	0,078542	0,070242	0,079942	0,061742	0,054842	0,042842
2010-2016	0,193125	0,324225	0,287325	0,704125	0,451325	0,451825	0,367925	0,355025	0,323925

Kabupaten Lombok Barat

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,043575	0,068675	0,041475	0,075875	0,080375	0,070175	0,066775	0,090875	0,045875
2011-2012	0,03859	0,06689	-0,27251	0,06919	0,03969	0,07559	0,06379	0,09939	0,03179
2012-2013	0,035041	0,028741	0,039241	0,048141	0,060841	0,075341	0,051941	0,076041	0,052541
2013-2014	0,01969	0,06719	0,04139	0,20329	0,07839	0,06999	0,08189	0,05749	0,05579
2014-2015	0,064077	0,072677	0,048777	0,045577	0,074577	0,050777	0,077277	0,076477	0,057077
2015-2016	0,025042	0,068442	0,055142	0,077642	0,083242	0,085042	0,036842	0,088442	0,044642
2010-2016	0,247725	0,434725	0,283925	0,634625	0,495725	0,509925	0,442525	0,599125	0,324125

Kota Mataram

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,049075	-0,04953	0,054275	0,091275	0,094675	0,155475	-0,09063	0,203375	0,120875
2011-2012	0,01159	-0,09721	-0,25531	0,08429	0,09359	0,08539	-0,36711	0,10699	0,01659
2012-2013	0,016041	0,003041	0,052841	0,055441	0,086341	0,101641	0,074341	0,110641	0,072041
2013-2014	0,02719	0,00279	0,05449	0,18669	0,09419	0,09279	0,08079	0,08729	0,08189
2014-2015	0,033777	0,002277	0,058577	0,051577	0,089677	0,081477	0,086877	0,103077	0,074977
2015-2016	0,027742	0,001842	0,068242	0,068542	0,086642	0,091642	0,078942	0,118342	0,062342
2010-2016	0,176725	-0,13328	0,385325	0,665225	0,684825	0,782425	-0,21628	0,984325	0,509225

Kota Bima

Tahun	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan Kontruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Jasa Persewaan & Jasa Perh	Jasa-Jasa
2010-2011	0,027475	0,052375	0,028875	0,100975	0,068775	0,069475	0,050075	0,058875	0,045675
2011-2012	0,04029	0,05429	-0,26071	0,10239	0,06029	0,08359	0,04949	0,06399	0,04129
2012-2013	0,019341	-0,04186	0,058441	0,203741	0,067641	0,090341	0,048841	0,064541	0,044241
2013-2014	0,03699	0,06559	0,03839	0,33689	0,06499	0,07219	0,05739	0,05949	0,05819
2014-2015	0,040177	0,073977	0,038177	-0,04252	0,066277	0,072077	0,060577	0,063977	0,050777
2015-2016	0,019142	0,062142	0,058442	0,155742	0,083442	0,080242	0,058942	0,059842	0,046342
2010-2016	0,197825	0,292025	0,293825	1,161225	0,488525	0,568725	0,372625	0,432925	0,322925

Jumlah penduduk

Daerah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab.Bima	439.228	443.663	447.286	450.976	463.419	468.682	473.890
Kab.Dompu	218.973	221.184	223.678	226.218	234.665	238.386	241.888
Kab.Lombok Barat	599.986	606.044	613.161	620.412	644.586	654.892	665.132
Kab.Lombok Tengah	860.209	868.895	875.231	881.686	903.432	912.879	922.088
Kab.Lombok Timur	1.105.582	1.116.745	1.123.488	1.130.365	1.153.773	1.164.018	1.173.781
Kab.Lombok Utara	200.072	202.092	203.564	205.064	210.133	212.265	214.393
kab.Sumbawa	415.789	419.987	423.029	426.128	436.599	441.102	445.503
Kab.Sumbawa Barat	114.951	116.112	118.608	121.167	129.724	133.391	137.072
Kota Bima	142.579	144.018	146.307	148.647	156.400	159.736	163.101
Kota Mataram	402.843	406.910	413.210	419.641	441.064	450.226	459.314
Provinsi	4.500.212	4.545.650	4.587.562	4.630.302	4.773.795	4.835.57	4.896.162

PDRB Per Kapita

Daerah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab.Bima	11.559.396	12.432.521	13.280.577	14.178.769	15.775.124	17.708.573	19.353.416
Kab.Dompu	14.874.581	15.451.291	16.261.931	17.184.525	19.046.531	21.141.232	23.202.351
Kab.Lombok Barat	11.685.808	12.647.699	13.351.422	14.172.741	15.717.580	17.479.124	19.046.311
Kab.Lombok Tengah	7.943.499	8.963.063	10.459.836	11.610.654	12.961.289	14.462.890	15.915.917
Kab.Lombok Timur	8.957.862	9.463.540	10.102.891	11.154.760	12.456.920	13.673.210	14.352.189
Kab.Lombok Utara	11.803.781	12.598.568	13.316.407	14.036.839	15.464.144	16.988.873	18.494.709
Kab.Sumbawa	14.807.154	16.120.351	17.349.291	18.641.679	20.830.851	23.199.761	25.571.172
Kab.Sumbawa Barat	15.812.124	16.980.170	18.721.634	19.521.323	21.180.345	23.011.260	24.800.100
Kota Bima	13.162.899	13.812.927	14.634.572	15.501.421	17.092.110	18.745.231	20.251.988
Kota Mataram	19.876.562	20.524.499	21.587.192	23.501.432	26.373.873	29.361.403	32.233.757
Provinsi	14.887.910	14.856.432	15.632.456	15.627.566	17.097.660	21.479.397	23.742.420

Laju pertumbuhan ekonomia di Provinsi Nusa Tenggara Barat (persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab.bima	4,55	6,02	5,95	5,11	6,01	6,27	4,69
Kab.dompu	4,10	7,20	6,18	5,05	5,54	6,16	5,40
Kab.lombok Barat	4,92	6,05	5,27	5,26	5,70	6,39	5,73
Kab.lombok tengah	5,64	10,89	13,72	6,24	6,28	5,58	5,67
Kab.lombok timur	5,01	6,23	5,43	5,51	4,79	5,91	5,18
Kab.lombok utara	4,03	5,34	4,08	4,11	4,59	4,73	4,99
Kab.sumbawa	5,92	6,97	6,67	6,44	6,63	6,43	5,26
Kab.sumbawa Barat	12,46	-26,28	-26,27	3,53	-1,31	107,07	7,14
Kota bima	5,74	5,12	5,60	5,58	5,89	5,76	5,78
Kota mataram	7,95	2,96	1,04	7,95	8,10	7,99	8,06
Provinsi	6,11	-3,91	-1,54	5,16	5,17	21,77	5,82

Matriks Tipologi Daerah

PDRB per kapita (y)	(yi<y)	(yi>y)
Laju pertumbuhan(r)		
(ri>r)	<p>Kuadran II</p> <p>Kab.bima: 2011,2012,2014 Bak.lombok Barat: 2011,2012,2013,2014,2016 Kab.lombok tengah:2011,2012,2013,2014,2016 Kab.lombok utara:2011,2012 Kab.lombok timur:2011,2012,2013 Kota bima:2011,2012,2013,2014,2016 Kab.dompu:2016</p>	<p>Kuadran I</p> <p>Kota mataram: 2010-2014,2016 Kab.sumbawa Barat: 2010,2015,2016 Kab.sumbawa: 2011,2012,2013,2014 Kab.dompu: 2011,2012,2014</p>
(ri<r)	<p>Kuadran III</p> <p>Kab.bima: 2010,2013,2015 Kab.dompu: 2010,2015 Bak.lombok Barat: 2010,2015 Kab.lombok tengah:2010,2015 Kab.lombok utara:2010,2013,2014,2015,2016 Kab.lombok timur:2010,2014,2015,2016 Kab.sumbawa: 2010, Kota bima:2010,2015,2016</p>	<p>Kuadran IV</p> <p>Kabupaten sumbawa Barat: 2011,2012,2013,2014 Kab.dompu: 2013 Kota mataram: 2015 Kab.sumbawa: 2015,2016</p>

Indeks Williamson Provinsi NTB

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,291	0,276	0,183	0,254	0,254	0,256	0,265